

HASIL PENELITIAN
PERAN ANGKATAN MUDA PARTAI GOLKAR (AMPG) DALAM
PENDIDIKAN POLITIK DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diusulkan oleh

SURYADI

Nomor Stambuk :10564 0134111



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Peran Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG)
dalam Pendidikan Politik di Kota Makassar

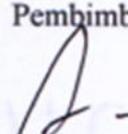
Nama Mahasiswa : Suryadi

NomorStambuk : 10564 01341 11

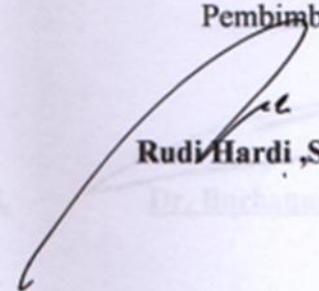
Program Studi: Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I


Drs. Arsyari Mone, M.Pd .

Pembimbing II


Rudi Hardi ,S.Sos.,M.Si

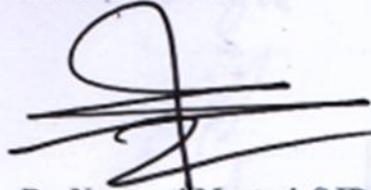
Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M. Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

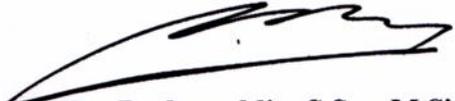
Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/ undangan menguji ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1342/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2018.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Abdul Kadir Adys, SH, MM
2. Dr. Amir Muhiddin, M.Si
3. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd.
4. Muchlas M.Tahir, S.IP, M. Si


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Suryadi

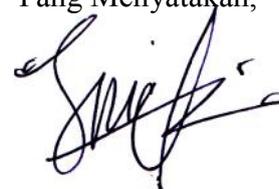
Nomor Stambuk : 10564 0134111

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 8 Mei 2018

Yang Menyatakan,



Supriadi

ABSTRACT

SURYADI. 2018. THE ROLE OF AMPG IN POLITICAL EDUCATION IN MANGGALA SUB DISTRICT, MAKASSAR CITY (Supervised by Ansyari Mone, as supervisor I and Rudi Hardi, as supervisor II.)

This research is intended to know the role of Non-Governmental Organizations in political education in sub-district of Manggala- city of Makassar and the extent of socialization of Non-Governmental Organization's role in political education in sub-district of Manggala- city of Makassar.

The type of research used in this study is descriptive qualitative, it is intended to collect data and information field in each variable object research and draw conclusions about what would be obtained from this research, this research as many as 5 Research subject that is community leaders, as well as senior officials and relevant Non-Governmental Organization's.

The results showed that the role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in Political Education Society in the city of Makassar has enough role to do political education to the community in the city of Makassar, of course with the aim of improving the understanding and political participation of the community against the democratic party in Indonesia and Socialization Politics to Society generally using Direct Counseling to the Community using methods: Lecture, Percentage and Qustion and answer

Keyword: Political Education, Non-Governmental Organization (NGO), Society Comprehension.

ABSTRAK

SURYADI. 2018. PERAN ANGKATAN MUDA PARTAI GOLKAR (AMPG) DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR.(dibimbing oleh Ansyari Mone, sebagai pembimbing I dan Rudi Hardi, sebagai pembimbing II.)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran Lembaga Swadaya Makassar dalam pendidikan politik di kecamatan Manggala kota Makassar serta sejauh mana sosialisasi peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pendidikan politik di kecamatan Manggala kota Makassar.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi lapangan pada masing-masing variabel objek penelitian serta menarik kesimpulan mengenai apa yang hendak diperoleh dari penelitian ini., penelitian ini sebanyak 5 orang yaitu tokoh masyarakat, masyarakat sekitar serta petinggi dan Fungsiionaris Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Lembaga Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Dalam Pendidikan Politik Masyarakat di kota Makassar sudah cukup berperan melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat di kota Makassar yang tentunya dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta partisipasi politik masyarakat terhadap pesta demokrasi di Indonesia serta Sosialisasi Politik ke Masyarakat umumn ya menggunakan Penyuluhan Langsung ke Masyarakat dengan menggunakan metode :Ceramah,Persentasi dan Tanya Jawab

Keyword : Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG),Pemahaman Masyarakat.Peran.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Teori Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	6
B. Teori Pendidikan Politik	26
C. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	49
D. Kerangka Pikir	61
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	64
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	64
C. Sumber Data	64
D. Teknik Pengumpulan Data	65
E. Teknik Analisa Data	66
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian	67
B. Peran Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dalam Melaksanakan Pendidikan Politik	76
C. Sosialisasi Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	80

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah. Masyarakat, organisasi masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komponen lain dapat berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kehidupan politik. penyelenggaraan pemerintahan telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati demokrasi pada tingkat lokal yang disebut pemilihan kepala daerah (pilkada). Pilkada merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat, sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pilkada tersebut rakyat menjadi pihak yang paling menentukan proses politik di wilayahnya dengan memberikan suara secara langsung.

Tumbangnya orde baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan bagi rakyat. Langkah terobosan yang dilakukan dalam proses demokratisasi adalah amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahun (1999-2002). Beberapa perubahan penting dilakukan terhadap UUD 1945 agar UUD 1945 mampu menghasilkan pemerintahan yang demokratis pula, peranan anggota DPR sebagai lembaga legislatif diperkuat, semua anggota DPR dipilih lewat pemilu, Pengawasan terhadap presiden diperketat, dan Hak Asasi Manusia memperoleh jaminan yang

semakin kuat, amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung dan pertama kali dilaksanakan tahun 2004 . Langkah Demokratis berikutnya adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung (Pilkada) yang diatur dalam UU No.32 tahun 2004

Budiarjo (2008):134) menjjelaskan bahwa mulai pertengahan tahun 2005, Semenjak itu semua kepala daerah yang habis masa jabatannya harus dipilih melalui proses pemilukada, pemilukada bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan diberikan hak bagi rakyat untuk menentukan kepala daerah, hal ini tentu berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang bersifat tidak langsung karna dipilih melalui DPR.

Strategi politik menjadi hal yang penting tidak hanya bagi partai politik dan pemerintahan, namun juga bagi organisasi non partai politik. dalam kajian lain strategi politik diartikan sebagai seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan, baik dalam kontestasi Pemilu maupun dalam Pemilukada. Strategi tersebut digunakan untuk merebut hati dan meraih simpati pemilih. Kerangka konsep sebelum melakukan strategi untuk suatu tujuan tertentu sangat diperlukan. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, baik dari diri sendiri maupun dari pihak lawan.

Pendidikan politik pada pelaksanaan pilkada di Kota Makassar sangat penting dilakukan, karena dalam rangka meminimalisir rendahnya partisipasi masyarakat serta golput. Rendahnya partisipasi masyarakat Kota Makassar dalam

hal ini juga perlu adanya pendidikan politik guna menyadarkan masyarakat Kota Yogyakarta untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada. Kondisi seperti ini menuntut penyelenggara pilkada, peserta pilkada, serta seluruh *stakeholder* (petaruh) baik organisasi masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) serta masyarakat untuk terus selalu menyebarluaskan informasi tersebut secara berkelompok.

Gaffar (2006: 205) berpendapat bahwa LSM memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan melihat LSM sebagai alternatif untuk memunculkan *civil society*. Membahas mengenai LSM sesungguhnya berkaitan erat dengan *civil society*, karena LSM merupakan tulang punggung dari *civil Society* yang kuat dan mandiri. Organisasi sosial dan politik yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi adalah LSM dan media massa. LSM memiliki tingkat keleluasaan bergerak, serta kebebasan dan kemandirian yang cukup tinggi, sehingga dapat dijadikan sumber daya politik yang potensial dalam menyiapkan *civil society*.

Berkaitan dengan itu maka *civil society* bermakna sebagai suatu ruang publik antara negara dan masyarakat. Kekuasaan negara dibatasi di dalam ruang publik oleh partisipasi politik masyarakat dalam rangka perumusan kebijaksanaan publik. Konteks ini setidaknya LSM cukup potensial ikut menciptakan *civil society* karena dengan kemampuannya yang mampu mengisi ruang publik.

Tujuan dari penyusunan kerangka strategi ini adalah untuk menentukan langkah dalam melakukan tindakan. Langkah yang dilakukan dalam strategi merupakan implementasi dari misi yang dibawa. Dapat di rumuskan bahwa instrumen yang digunakan sebagai strategi politik dalam pemilu adalah melalui komunikasi. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas kekuatan politik. Keberhasilan dalam membentuk kekuatan politik dapat dilihat dari kemampuan aktor tersebut melaksanakan fungsinya. Kekuatan politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.

Peran LSM dalam Memberikan Pemahaman Politik di masyarakat menjadi salah satu hal penting untuk di teliti sebagai suatu upaya untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam suatu proses pemilihan umum yang di laksanakan oleh KPU sebagai sebuah hasil Dari demokrasi. karna itu peneliti berinisiatif untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pendidikan Politik Di Kota Makassar**

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana peran Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dalam pendidikan politik di kecamatan Manggala kota Makassar ?

2. Bagaimana sosialisasi Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dalam pendidikan politik di kecamatan Manggala kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) kota Makassar dalam pendidikan politik di kecamatan Manggala kota Makassar.
2. Untuk mengetahui sejauh mana sosialisasi peran Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dalam pendidikan politik di kecamatan Manggala kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis.

Diharapkan agar dapat memperkaya konsep-konsep ataupun teori yang dapat membuat serta meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya perkembangan ilmu politik, khususnya tentang pendidikan politik bagi masyarakat di kecamatan Manggala kota Makassar.

2. Manfaat Praktis.

Dalam penelitian ini agar kiranya dapat memberikan masukan-masukan yang berarti maupun pelajaran-pelajaran yang berarti bagi Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) sebagai dasar untuk memberikan pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan politik untuk masyarakat di kecamatan Manggala kota Makassar .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peran Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG)

1) Sejarah Angkatan Muda Partai Golkar

Partai GOLKAR merupakan salah satu kekuatan sosial politik era reformasi yang memiliki tekad untuk meneruskan langkah dan perannya ditengah-tengah kehidupan nasional yang terus maju dan berubah menuju perbaikan dan modernisasi. Partai GOLKAR menyadari sepenuhnya bahwa tuntutan perbaikan dan pembaharuan sistem nasional disegala bidang mengharuskan adanya usaha seluruh komponen nasional untuk aktif dan berperan dalam sebuah aspek pembangunan. Apalagi Partai GOLKAR menyadari betul bahwa krisis nasional yang melanda bangsa belum juga terselesaikan dengan baik dan tuntas. Semenjak reformasi didengungkan banyak problem-problem nasional yang mencuat mengikuti lenggang reformasi.

Diantara permasalahan yang masih menyita perhatian kita adalah :

1. Merebaknya Konflik Sosial dan Munculnya Gejala Disintegrasikan.

Meski selama masa reformasi seluruh rakyat dan penyelenggaraan negara telah berusaha menegakkan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun, masih terdapat ancaman, hambatan, dan gangguan yang mengarah pada ancaman;

2. Lemahnya Penegakan Hukum dan Hak Azazi Manusia.

Kondisi ini seiring dengan pembangunan hukum yang tidak komperhensif dan diimbangi dengan integritas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum. Kondisi inilah yang menyebabkan rendahnya mutu pelayanan publik di bidang hukum. Tekad pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme masih setengah hati. kecendrungan kuat adanya intervensi dan pengaruhkekuasaan dan politik dalam proses peradilan masih tidak luput dari perhatian publik. Perlindungan hukum dan penghormatan atas HAM juga belum terjamin dengan baik.

3. Lambatnya Pemulihan Ekonomi.

Upaya mengatasi krisis ekonomi melalui program reformasi ekonomi belum memadai. Kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat tetapi memusatkan pada kekuatan ekonomi dilingkaran sekelompok kecil masyarakat, dilingkaran kekuasaan, yang terindikasi dengan masih merebaknya perilaku KKN di lingkaran kekuasaan dan birokrasi;

4. Rendahnya Kesejahteraan Rakyat, Meningkatnya Penyakit Sosial, dan Lemahnya Budaya Nasional.

Krisis ekonomi telah menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat menurun. Angka pengangguran terus meningkat, jumlah penduduk miskin membengkak, jaminan hak dan perlindungan tenaga kerja sangat rendah, seiring dengan derajat

kesehatan masyarakat yang semakin menurun. Kondisi ini menindikasikan kuatnya kesenjangan perilaku formal kehidupan beragama dengan realitas nyata kehidupan sehari-hari.

5. Kurang Berkembangnya Kapasitas Pembangunan Daerah dan Masyarakat.

Salah satu faktor utama yang mengakibatkan daerah tidak berkembang adalah sentralisasi kekuasaan terutama di bidang politik dan ekonomi masih terlalu kuat. Hal ini mengurangi kesempatan masyarakat untuk mengembangkan kreativitas, mendapat hak-hak ekonomi, sosial, dan politiknya.

Sekian banyak permasalahan tersebut mengiringi komitmen Partai GOLKAR dalam menyusun paradigma barunya. Kesadaran dan tuntutan untuk memperjuangkan dan membumikan agenda reformasi terus menggeliat. Salah satu komitmen tersebut dikemukakan dalam Paradigma Baru Partai GOLKAR bahwa “ Perjuangan Politik Partai GOLKAR Bermuara Pada Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Lahir Dan Bathin. Dalam Kaitan Ini Partai Golkar Memandang Politik Sebagai Instrumen Dan Manajemen Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Yang Sejahtera, adil, dan Makmur. Peningkatan Kesejahteraan Itu Diwujudkan Dalam Bentuk Antara Lain Peningkatan Taraf Hidup Dan Kecerdasan Rakyat. Dengan sikap ini, maka Partai GOLKAR Mempertegas Keberpihakannya Kepada Rakyat.”

Pada tanggal 7 Maret 1999, Ketua Umum DPP Partai GOLKAR, Ir. Akbar Tandjung, kemudian mendeklarasi GOLKAR Baru yang intinya adalah

mengukuhkan GOLKAR sebagai partai baru di era reformasi. Partai GOLKAR melakukan langkah yang sungguh-sungguh untuk memutuskan hubungan model dan perilaku politiknya yang dimasa lalu (disconnections) sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Sedikitnya terdapat enam (6) komitmen yang dibangun Partai GOLKAR dengan Deklarasi tanggal 7 Maret 1999, yakni dengan mendirikan partai baru, maka Partai GOLKAR menyatakan diri sebagai partai:

1. Partai Golkar adalah Partai Terbuka (Inklusif) bagi segenap golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, bahasa, dan status sosial ekonomi. Keterbukaan GOLKAR diwujudkan secara sejati, baik dalam penerimaan anggota maupun dalam rekrutmen kader untuk kepengurusan dan penempatan pada posisi politik. Keterbukaan GOLKAR merupakan manifestasi dari wawasan kebangsaan yang dijunjungnya, yaitu suatu wawasan yang menolak segala bentuk primordialisme dan sektarianisme, baik nyata maupun terselubung. GOLKAR mengembangkan wawasan kemajemukan yang inklusif dalam pengertian keterbukaan dan kemajemukan yang mendorong dinamika dan persaingan yang sehat serta berorientasi pada kemajuan sehingga dengan visi ini GOLKAR senantiasa siap bersaing secara sehat.
2. Partai Golkar adalah Partai Mandiri yang merupakan organisasi kekuatan sosial politik yang mampu mengambil setiap keputusan politik dan kebijakan organisasi tanpa campur tangan atau intervensi dari siapapun dan pihak manapun. PARTAI GOLKAR adalah partai yang independen,

baik secara struktural maupun kultural. Secara struktural PARTAI GOLKAR tidak lagi mengenal lembaga Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, sistem tiga Jalur dan tidak lagi mengandalkan pada kekuatankekuatan yang ada diluar dirinya seperti paradigma lama. Demikian juga halnya musyawarahmusyawarah PARTAI GOLKAR, baik di tingkat pusat maupun daerah, keputusan-keputusan ini yang diambil pasti dan selalu bersifat yang mencerminkan secara penuh kedaulatan di tangan anggota.

3. Partai Golkar adalah Partai Demokratis. Sebagai partai yang demokratis GOLKAR senantiasa baik secara internal maupun eksternal betul-betul menjadi pelopor tegaknya kehidupan politik yang demokratis dan terbuka. Komitmen pada demokrasi ini merupakan manifestasi dari hadirnya kesadaran bahwa dalam masyarakat yang semakin demokratis dan terbuka, maka PARTAI GOLKAR akan survive bilamana ia juga demokratis dan terbuka. Dengan kata lain, PARTAI GOLKAR hanya akan tetap berjaya, jika di dalam tubuh organisasinya sendiri tegak kehidupan yang demokratis.
4. Partai Golkar adalah Partai Moderat Sebagai partai yang Moderat GOLKAR senantiasa mengutamakan posisi tengah (moderat) dan tidak berorientasi ke kiri atau ke kanan secara ekstrem. Dengan demikian GOLKAR Baru mengembangkan sikap non-sektarian, bahkan dapat dikatakan anti sektarian. Visi politik moderat adalah visi yang dianggap

paling tepat dengan menyadari kenyataan sosiologis dan politis dari masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.

5. Partai Golkar adalah Partai yang Solid Sebagai partai yang solid GOLKAR secara utuh dan kukuh senantiasa berupaya mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya secara sinergis. Dengan visi ini, GOLKAR melakukan konsolidasi organisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan mengembangkan manajemen organisasi yang modern dan canggih. Hubungan dengan Orsosmasinal dan Orsinalmas dikembangkan dengan pendekatan Fungsional yang saling menguntungkan dalam hubungan kemitraan setara.
6. Partai Golkar adalah Partai yang Mengakar Sebagai partai yang mengakar GOLKAR senantiasa mengupayakan agar para anggota dan kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan azas prestasi, bukan berdasarkan atas kolusi dan nepotisme. Sebagai Partai yang didirikan oleh kelompokkelompok riil dalam masyarakat GOLKAR tumbuh dan berkembang dari rakyat dan didukung oleh rakyat.

Berdasarkan enam (6) komitmen tersebut, maka sejatinya kekuasaan itu pada dasarnya bersumber dari kita dan kita bukan perpanjangan tanpa kekuasaan. Dengan visi yang demikian maka GOLKAR Baru menolak apa yang dituduhkan beberapa kalangan yang menganggap GOLKAR sebagai hanya mesin pengumpul suara dari pemerintah (The Ruler's Party) seperti dalam paradigma lama. Partai GOLKAR adalah GOLKAR Baru yang terus mereformasi dirinya untuk menuju the rulling party atau partai yang darinya kekuasaan bersumber.

Pola hubungan antara partai Golkar dan pemerintah dapat dikembangkan atas dasar hubungan fungsional antara infra dan supra struktur politik yang mempunyai keterkaitan erat. Rumusan hubungan tersebut secara sederhana dapat dikatakan hubungan yang bersifat konstruktif korektif atau korektif konstruktif. Dengan gambaran komitmen Partai GOLKAR tersebut diharapkan setiap anggota dan kader yakin bahwa Partai GOLKAR adalah partai yang besar, partai yang kuat dan partai yang selalu berakar di hatinya rakyat Indonesia.

Untuk mencapai terwujudnya harapan dan cita-cita Partai GOLKAR tersebut akan akan semakin kuat apabila didukung oleh seluruh kekuatan pendukung Partai GOLKAR yang berada dalam seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Pada pemilihan umum 1999, kekuatan pendukung Partai GOLKAR telah membuktikan bahwa Partai GOLKAR masih harus terus diperhitungkan dan diperjuangkan dalam rangka Pengabdian Pada Bangsa dan Negara. Perolehan di MPR dan DPR membuktikan bahwa rakyat Indonesia masih mempercayai Partai GOLKAR sebagai partai politik untuk ikut serta membangun dan menyelamatkan bangsa dari krisis nasional. Beban tanggung jawab yang diberikan kepada Partai GOLKAR meminta partai untuk terus menerus harus menata diri dan melakukan kerja keras guna lebih berperan dalam pembangunan baru pada abad XXI.

Untuk mengejewantah paradigma barunya terutama dalam aspek pembaharuan struktur kelembagaan, maka dalam perspektif perlu kekuatan-kekuatan pendukung Partai GOLKAR sehingga Partai GOLKAR menjadi kekuatan riil dalam ikut menentukan perubahan yang lebih baik, adil, demokrasi, dan sejahtera. Segera

membentuk organisasi-organisasi sayap untuk mengakarkan perannya ditengah-tengah kehidupan nasional.

Pembentukan organisasi-organisasi merupakan kebutuhan Partai GOLKAR yang tidak bisa ditawar-tawar. Pembentukan tersebut bertujuan untuk memperluas basis Partai GOLKAR di tengah-tengah masyarakat, yang dikembangkan berdasarkan kelompok-kelompok strategis seperti Pemuda dan mahasiswa, Wanita, Pekerja, Petani, Nelayan, Keagamaan, Seniman, Budayawan, dan kelompok swadaya masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Partai GOLKAR menyadari sepenuhnya bahwa generasi muda memiliki potensi dan posisi strategis yang sangat menentukan perkembangan bangsa dan negara ke masa depan. Apabila diorganisir secara terarah, baik dan maksimal, maka kaum muda menjadi kekuatan utama pembaruan dan kemajuan bangsa menuju harapan masyarakat Indonesia sebagaimana di cita-citakan. Partai GOLKAR menyadari sepenuhnya akan kuatnya potensi pemuda dalam lingkungan pendukung Partai GOLKAR. Itulah sebabnya potensi kaum muda perlu terus di galang secara nasional dan diwadahi di dalam wadah Sayap Pemuda Partai GOLKAR ditengah-tengah masyarakat serta melakukan kegiatan dalam kemajuan partai dan mati hidupnya partai.

Guna mendukung perjuangan Partai GOLKAR sesuai dengan paradigma barunya tersebut, Rapat Pimpinan ke V menganggap bahwa begitu sangat mendesak dan prioritas untuk segera dibentuknya Sayap Pemuda Partai GOLKAR. Tuntutan pembentukan Sayap Pemuda Partai GOLKAR merupakan

kebutuhan riil dan mendesak dari partai. Ia merupakan tuntutan hari ini dan masa depan yang berjalan konsisten dengan keinginan Partai GOLKAR untuk mewujudkan kehendak Paradigma barunya terutama dalam aspek penataan dan pembaharuan kelembagaan Partai GOLKAR ke depan.

Dalam rangka menyahuti RAPIM V Partai GOLKAR, maka secara aspiratif Rapat Koordinasi Nasional Bidang Pemuda Partai GOLKAR yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 9-11 Februari 2002 menghasilkan keputusan yang sangat penting dan mendasar yaitu disepakati dan ditetapkannya pembentukan Angkatan Muda Partai GOLKAR (AMPG) sebagai sayap muda dilingkungan Partai GOLKAR. Deklarasi Angkatan Muda Partai GOLKAR (AMPG) menyatakan kehendak kaum muda Partai GOLKAR untuk terus memperjuangkan Partai GOLKAR dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Segenap komponen kaum muda Partai GOLKAR yang merupakan bagian dari potensi kader bangsa menyadari sepenuhnya bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mulia mewujudkan hari depan Indonesia yang lebih baik, menuntut Partai GOLKAR untuk makin mengakar dalam urat nadi kehidupan rakyat Indonesia. Kaum muda Partai GOLKAR menyadari mengakarnya Partai GOLKAR dalam kehidupan rakyat semakin meningkatkan respon dan antisipasi dalam menangkap tuntutan dan aspirasi rakyat dan memperjuangkan dengan segenap daya dan kekuatan. Dengan keyakinan itu, kaum muda Partai GOLKAR menyadari tanggung jawabnya untuk menyahuti tuntutan perjuangan kebangsaan Indonesia dan bertekad menjadi pilar utama dalam memperjuangkan Partai GOLKAR sebagai Partai yang memperjuangkan cita-cita luhur seluruh rakyat Indonesia, maka kaum

muda Partai GOLKAR dengan ini menyatakan keberadaannya untuk menyatu dalam barisan utama Partai GOLKAR dan oleh karena itu menyatakan diri berhimpun di dalam wadah Angkatan Muda Partai GOLKAR (AMPG).

2) Posisi AMPG

Posisi Angkatan Muda Partai Golkar yang lahir pada tanggal 11 Februari 2002 merupakan tuntutan kebutuhan partai tentang perlunya sayap pemuda partai GOLONGAN KARYA. Kehadiran AMPG sebagai pemuda partai GOLONGAN KARYA karena bukan sebuah `rekayasa` untuk kepentingan jangka pendek partai. Tetapi ia merupakan p[erwujudan tekad Partai GOLONGAN KARYA untuk berada dalam kehidupan kepemudaan dan masyarakat Indonesia guna merealisasikan misi perjuangan Partai GOLONGAN KARYA demi kemajuan dan kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. AMPG juga menjadi bagian yang sangat penting untuk mencapai visi partai khususnya dalam melaksanakan catur sukses partai, terutama catur yang kedua, yakni Sukses Kaderisasi, yaitu dengan memperluas basis partai untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya kader-kader baru sebagai produk sistem perkaderan yang akan dilaksanakan. AMPG sebagai Organisasi Sayap Kepemudaan akan diarahkan untuk dapat menciptakan konstituen baru dengan melakukan penggalangan secara aktif terhadap generasi muda.

Dalam Anggaran Dasar Partai GOLONGAN KARYA adalah sebagai bagian dari Partai GOLONGAN KARYA BAB X Pasal 25 dan Anggaran Rumah Tangga BAB VII Pasal 21 tentang Organisasi Sayap, dibentuknya

sayap pemuda Partai GOLONGAN KARYA dan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Partai GOLONGAN KARYA.

Dasar pemikiran organisasi saya AMPG adalah

Pertama, Sebagai sayap kepemudaan Partai GOLONGAN KARYA dituntut memainkan peran penting dalam menjawab masalah-masalah, tantangan dan kebutuhan Partai GOLONGAN KARYA dalam usaha menyahuti perjuangan Partai GOLONGAN KARYA sesuai visi-misi Partai GOLONGAN KARYA kedelapan.

Kedua, sebagai bagian dari Partai GOLONGAN KARYA, sayap kepemudaan Partai GOLONGAN KARYA meletakkan kegiatannya pada penggalangan massa kepemudaan nasional dan bergerak sebagai kekuatan yang mempunyai posisi strategis dalam melakukan kegiatan-kegiatan dengan semangat perjuangan sebagai sayap Partai GOLONGAN KARYA ditengah-tengah masyarakat serta melakukan kegiatan dalam membela kemajuan partai serta hidup matinya partai.

Ketiga, AMPG sebagai Organisasi Sayap akan menjadi wadah untuk mensinergikan seluruh gerakan dan potensi pemuda dengan mengintegrasikan seluruh organisasi kepemudaan yang berada dilingkungan Partai GOLONGAN KARYA (OKP Kekaryaan) Dengan demikian posisi AMPG dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama,

Angkatan Muda Partai Golongan Karya berkedudukan pada seluruh jajaran kepengurusan Partai GOLONGAN KARYA dari tingkat pusat sampai ke tingkat kelurahan. Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golongan Karya dijabat secara ex-officio oleh Ketua / Korbid Pemuda Partai Golongan Karya. Struktur Angkatan Muda Partai Golongan Karya diatur secara tersendiri dalam pengaturan tentang Kelembagaan Angkatan Muda Partai Golongan Karya melalui sebuah Peraturan Organisasi (PO) Nomor: PO-01/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang organisasi sayap Angkatan Muda Partai Golongan Karya.

Kedua,

Angkatan Muda Partai Golongan Karya sebagai organisasi sayap Partai Golongan Karya menjadi bagian dari Partai Golongan Karya (embodied) pada semua tingkat Dewan Pimpinan Partai. Karena itu AMPG tidak memiliki AD/ART sendiri dan secara internal diatur dalam PD/PRT yang mengacu pada AD/ART Partai Golongan Karya; memiliki Pedoman Organisasi dan doktrin yang merupakan doktrin Partai Golongan Karya. Oleh karenanya program Kepemudaan Partai Golongan Karya dan program terkait lainnya diseluruh jajarannya adalah program yang dilaksanakan oleh AMPG.

Ketiga,

Angkatan Muda Partai Golongan Karya menjadi wadah berhimpun dari seluruh organisasi kepemudaan, baik organisasi kepemudaan yang dibentuk oleh kino, yang mendirikan Partai Golongan Karya; yang

didirikan oleh Partai Golongan Karya; dan yang secara historis menyalurkan aspirasinya kepada Partai Golongan Karya (OKP Kekaryaannya), dimana ketua umum dari seluruh OKP Kekaryaannya tersebut secara *ex officio* menjadi Ketua Pimpinan AMPG pada setiap tingkatannya. Kewberhimpunan seluruh organisasi kepemudaan kekaryaannya ini akan menjadi sinergis dengan dilakukannya sinkronisasi kebijakan dan koordinasi pelaksanaan program serta gerakan yang berorientasi kepada peningkatan dampak positif terhadap Partai Golongan Karya.

Keempat,

Angkatan Muda Partai Golongan Karya, merupakan sumber utama perkaderan generasi muda Partai Golongan Karya (Cadre forming) dan sekaligus bagian dari sumber rekrutmen kader Partai Golongan Karya ke masa depan (Cadre Promotion). Dan bahkan seharusnya AMPG memosisikan diri sebagai sumber kader, baik sebagai sumber kader partai maupun sebagai sumber kepemimpinan bangsa untuk melanjutkan kepemimpinan Partai Golongan Karya.

Kelima,

Angkatan Muda Partai Golongan Karya, merupakan organisasi yang diharapkan dapat mendinamisasi struktur Partai Golongan Karya dan tuntutan perkembangan dan dinamika politik nasional. Partai Golongan Karya dituntut untuk bisa melebarkan sayapnya dan memperluas jaringan

pengembangan basis masa dukungan yang akan menjadi daya politik partai.

ada tanggal 7 Maret 1999, Ketua Umum DPP Partai GOLKAR, Ir. Akbar Tandjung, kemudian mendeklarasi GOLKAR Baru yang intinya adalah mengukuhkan GOLKAR sebagai partai baru di era reformasi. Partai GOLKAR melakukan langkah yang sungguh-sungguh untuk memutuskan hubungan model dan perilaku politiknya yang dimasa lalu (disconnections) sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Sedikitnya terdapat enam (6) komitmen yang dibangun Partai GOLKAR dengan Deklarasi tanggal 7 Maret 1999, yakni dengan mendirikan partai baru, maka Partai GOLKAR menyatakan diri sebagai partai:

1. Partai Golkar adalah Partai Terbuka (Inklusif) bagi segenap golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, bahasa, dan status sosial ekonomi. Keterbukaan GOLKAR diwujudkan secara sejati, baik dalam penerimaan anggota maupun dalam rekrutmen kader untuk kepengurusan dan penempatan pada posisi politik. Keterbukaan GOLKAR merupakan manifestasi dari wawasan kebangsaan yang dijunjungnya, yaitu suatu wawasan yang menolak segala bentuk primordialisme dan sektarianisme, baik nyata maupun terselubung. GOLKAR mengembangkan wawasan kemajemukan yang inklusif dalam pengertian keterbukaan dan kemajemukan yang mendorong dinamika dan persaingan yang sehat serta berorientasi pada kemajuan sehingga dengan visi ini GOLKAR senantiasa siap bersaing secara sehat.

2. Partai Golkar adalah Partai Mandiri yang merupakan organisasi kekuatan sosial politik yang yang mampu mengambil setiap keputusan politik dan kebijakan organisasi tanpa campur tangan atau intervensi dari siapapun dan pihak manapun. PARTAI GOLKAR adalah partai yang independen, baik secara struktural maupun kultural. Secara struktural PARTAI GOLKAR tidak lagi mengenal lembaga Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, sistem tiga Jalur dan tidak lagi mengandalkan pada kekuatan-kekuatan yang ada diluar dirinya seperti paradigma lama. Demikian juga halnya musyawarah-musyawarah PARTAI GOLKAR, baik di tingkat pusat maupun daerah, keputusan-keputusan ini yang diambil pasti dan selalu bersifat yang mencerminkan secara penuh kedaulatan di tangan anggota.
3. Partai Golkar adalah Partai Demokratis. Sebagai partai yang demokratis GOLKAR senantiasa baik secara internal maupun eksternal betul-betul menjadi pelopor tegaknya kehidupan politik yang demokratis dan terbuka. Komitmen pada demokrasi ini merupakan manifestasi dari hadirnya kesadaran bahwa dalam masyarakat yang semakin demokratis dan terbuka, maka PARTAI GOLKAR akan survive bilamana ia juga demokratis dan terbuka. Dengan kata lain, PARTAI GOLKAR hanya akan tetap berjaya, jika di dalam tubuh organisasinya sendiri tegak kehidupan yang demokratis.
4. Partai Golkar adalah Partai Moderat Sebagai partai yang Moderat GOLKAR senantiasa mengutamakan posisi tengah (moderat) dan tidak

berorientasi ke kiri atau ke kanan secara ekstrem. Dengan demikian GOLKAR Baru mengembangkan sikap non-sektarian, bahkan dapat dikatakan anti sektarian. Visi politik moderat adalah visi yang dianggap paling tepat dengan menyadari kenyataan sosiologis dan politis dari masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.

5. Partai Golkar adalah Partai yang Solid Sebagai partai yang solid GOLKAR secara utuh dan kukuh senantiasa berupaya mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya secara sinergis. Dengan visi ini, GOLKAR melakukan konsolidasi organisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan mengembangkan manajemen organisasi yang modern dan canggih. Hubungan dengan Orsosmasinal dan Orsinalmas dikembangkan dengan pendekatan Fungsional yang saling menguntungkan dalam hubungan kemitraan setara.
6. Partai Golkar adalah Partai yang Mengakar Sebagai partai yang mengakar GOLKAR senantiasa mengupayakan agar para anggota dan kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan azas prestasi, bukan berdasarkan atas kolusi dan nepotisme. Sebagai Partai yang didirikan oleh kelompokkelompok riil dalam masyarakat GOLKAR tumbuh dan berkembang dari rakyat dan didukung oleh rakyat.

Berdasarkan enam (6) komitmen tersebut, maka sejatinya kekuasaan itu pada dasarnya bersumber dari kita dan kita bukan perpanjangan tanpa kekuasaan. Dengan visi yang demikian maka GOLKAR Baru menolak apa yang dituduhkan beberapa kalangan yang menganggap GOLKAR sebagai hanya mesin

pengumpul suara dari pemerintah (The Ruler's Party) seperti dalam paradigma lama. Partai GOLKAR adalah GOLKAR Baru yang terus mereformasi dirinya untuk menuju the rulling party atau partai yang darinya kekuasaan bersumber. Pola hubungan antara partai Golkar dan pemerintah dapat dikembangkan atas dasar hubungan fungsional antara infra dan supra struktur politik yang mempunyai keterkaitan erat. Rumusan hubungan tersebut secara sederhana dapat dikatakan hubungan yang bersifat konstruktif korektif atau korektif konstruktif. Dengan gambaran komitmen Partai GOLKAR tersebut diharapkan setiap anggota dan kader yakin bahwa Partai GOLKAR adalah partai yang besar, partai yang kuat dan partai yang selalu berakar di hatinya rakyat Indonesia.

Untuk mencapai terwujudnya harapan dan cita-cita Partai GOLKAR tersebut akan akan semakin kuat apabila didukung oleh seluruh kekuatan pendukung Partai GOLKAR yang berada dalam seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Pada pemilihan umum 1999, kekuatan pendukung Partai GOLKAR telah membuktikan bahwa Partai GOLKAR masih harus terus diperhitungkan dan diperjuangkan dalam rangka Pengabdian Pada Bangsa dan Negara. Perolehan di MPR dan DPR membuktikan bahwa rakyat Indonesia masih mempercayai Partai GOLKAR sebagai partai politik untuk ikut serta membangun dan menyelamatkan bangsa dari krisis nasional. Beban tanggung jawab yang diberikan kepada Partai GOLKAR meminta partai untuk terus menerus harus menata diri dan melakukan kerja keras guna lebih berperan dalam pembangunan baru pada abad XXI.

Untuk mengejewantah paradigma barunya terutama dalam aspek pembaharuan struktur kelembagaan, maka dalam perspektif perlu kekuatan-kekuatan pendukung Partai GOLKAR sehingga Partai GOLKAR menjadi kekuatan riil dalam ikut menentukan perubahan yang lebih baik, adil, demokrasi, dan sejahtera. Segera membentuk organisasi-organisasi sayap untuk mengakarkan perannya ditengah-tengah kehidupan nasional.

Pembentukan organisasi-organisasi merupakan kebutuhan Partai GOLKAR yang tidak bisa ditawar-tawar. Pembentukan tersebut bertujuan untuk memperluas basis Partai GOLKAR di tengah-tengah masyarakat, yang dikembangkan berdasarkan kelompok-kelompok strategis seperti Pemuda dan mahasiswa, Wanita, Pekerja, Petani, Nelayan, Keagamaan, Seniman, Budayawan, dan kelompok swadaya masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Partai GOLKAR menyadari sepenuhnya bahwa generasi muda memiliki potensi dan posisi strategis yang sangat menentukan perkembangan bangsa dan negara ke masa depan. Apabila diorganisir secara terarah, baik dan maksimal, maka kaum muda menjadi kekuatan utama pembaruan dan kemajuan bangsa menuju harapan masyarakat Indonesia sebagaimana di cita-citakan. Partai GOLKAR menyadari sepenuhnya akan kuatnya potensi pemuda dalam lingkungan pendukung Partai GOLKAR. Itulah sebabnya potensi kaum muda perlu terus di galang secara nasional dan diwadahi di dalam wadah Sayap Pemuda Partai GOLKAR ditengah-tengah masyarakat serta melakukan kegiatan dalam kemajuan partai dan mati hidupnya partai.

Guna mendukung perjuangan Partai GOLKAR sesuai dengan paradigma barunya tersebut, Rapat Pimpinan ke V menganggap bahwa begitu sangat mendesak dan prioritas untuk segera dibentuknya Sayap Pemuda Partai GOLKAR. Tuntutan pembentukan Sayap Pemuda Partai GOLKAR merupakan kebutuhan riil dan mendesak dari partai. Ia merupakan tuntutan hari ini dan masa depan yang berjalan konsisten dengan keinginan Partai GOLKAR untuk mewujudkan kehendak Paradigma barunya terutama dalam aspek penataan dan pembaharuan kelembagaan Partai GOLKAR ke depan.

Dalam rangka menyahuti RAPIM V Partai GOLKAR, maka secara aspiratif Rapat Koordinasi Nasional Bidang Pemuda Partai GOLKAR yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 9-11 Februari 2002 menghasilkan keputusan yang sangat penting dan mendasar yaitu disepakati dan ditetapkannya pembentukan Angkatan Muda Partai GOLKAR (AMPG) sebagai sayap muda dilingkungan Partai GOLKAR. Deklarasi Angkatan Muda Partai GOLKAR (AMPG) menyatakan kehendak kaum muda Partai GOLKAR untuk terus memperjuangkan Partai GOLKAR dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Segenap komponen kaum muda Partai GOLKAR yang merupakan bagian dari potensi kader bangsa menyadari sepenuhnya bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mulia mewujudkan hari depan Indonesia yang lebih baik, menuntut Partai GOLKAR untuk makin mengakar dalam urat nadi kehidupan rakyat Indonesia. Kaum muda Partai GOLKAR menyadari mengakarnya Partai GOLKAR dalam kehidupan rakyat semakin meningkatkan respon dan antisipasi dalam menangkap tuntutan dan aspirasi rakyat dan memperjuangkan dengan segenap daya dan kekuatan.

Dengan keyakinan itu, kaum muda Partai GOLKAR menyadari tanggung jawabnya untuk menyahtuntutan perjuangan kebangsaan Indonesia dan bertekad menjadi pilar utama dalam memperjuangkan Partai GOLKAR sebagai Partai yang memperjuangkan cita-cita luhur seluruh rakyat Indonesia, maka kaum muda Partai GOLKAR dengan ini menyatakan keberadaannya untuk menyatu dalam barisan utama Partai GOLKAR dan oleh karena itu menyatakan diri berhimpun di dalam wadah Angkatan Muda Partai GOLKAR (AMPG).

3) PERAN AMPG

Sebagai organisasi sayap dilingkungan Partai Golongan Karya, Angkatan Muda Partai Golongan Karya harus mengambil peran sebagai kekuatan yang mampu mengkonsolidasikan seluruh potensi pemuda didalam lingkungan partai yang ditunjukan dengan kemampuan mengintegrasikan seluruh pemikiran, aktivitas, gerak, dan pelaksanaan program kepemudaan Partai Golongan Karya. Dalam kaitan itu, AMPG dituntut untuk bersifat terbuka dan tetap berorientaikan pada karya kekaryaan. Pada konteks yang lain, AMPG harus berperan sebagai pelanjut perjuangan Partai Golongan Karya di masa depan.

AMPG berperan melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasikan, dan mensinergikan aktivitas, gerak dan program kepemudaan Partai Golongan Karya. Dalam menjalankan program tersebut, AMPG melaksanakan sesuai dengan plat form, visi dan misi Partai Golongan Karya serta menjaga dan mengamalkan marwah kewibawaan Partai Golongan Karya. AMPG juga berperan dalam melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan kader, penggalangan dan

pengembangan massa Partai Golongan Karya serta sebagai wadah keberhimpunan organisasi-organisasi potensial strategis kepemudaan seperti organisasi kemasyarakatan pemuda karya kekaryaan, mahasiswa dan kelompok swadaya masyarakat.

D. TUGAS AMPG

Dalam hubungan kelembagaan, AMPG yang merupakan organisasi sayap Partai Golongan Karya memosisikan diri sebagai bagian (embodied) dari Partai Golongan Karya. Ini berarti seluruh program-program kepemudaan partai yang selama ini dilaksanakan oleh Bidang Pemuda Partai Golongan Karya sesuai tingkatannya, akan menjadi garapan operasional kegiatan Angkatan Muda Partai Golongan Karya disemua tingkatannya. Baik ditingkat pusat maupun daerah. Selain program kepemudaan tersebut, AMPG juga bertugas menjadi pelaksana program-program yang terkait dengan fungsi elektoral partai, dimana program-program tersebut akan didistribusikan kepada OKP Kekaryaan yang tergabung dalam wadah AMPG untuk dilaksanakan.

Mecermati itu, AMPG memiliki tugas pokok, yaitu :

1. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Partai Golongan Karya.
2. Melakukan kegiatan dalam rangka rekrutmen, pengkaderan, pengembangan dan penggalangan massa Partai Golongan Karya sesuai bidang dan kelompok strategisnya.

3. Merespon kebutuhan (Need) dan kepentingan (interest) pemuda, mahasiswa dan pelajar melalui bentuk-bentuk program pengembangan minat dan bakat.
4. Mempersiapkan kader-kader pemuda Partai Golongan Karya dalam rangka estafet kepemimpinan Partai Golongan Karya.

Dalam melaksanakan tugas pokok ini AMPG akan melakukan kegiatan-kegiatan dengan semangat perjuangan sebagai sayap Pemuda Partai Golongan Karya dengan berkoordinasi secara vertikal dan horizontal bagi kelancaran serta keselarasan pelaksanaan dan pencapaian tujuan program Partai Golongan Karya di bidang kepemudaan sebagai sebuah upaya dalam membela kemajuan dan panji-panji partai.

Untuk itulah AMPG harus melakukan orientasi program yang bertujuan untuk penajaman bentuk program secara kualitatif dan kuantitatif. Pada jangka menengah, Program AMPG diarahkan pada muatan program yang memiliki spektrum daya pengaruh yang secara langsung diarahkan pada upaya kemenangan Partai Golongan Karya pada setiap PEMILU. Dalam jangka panjang, Program AMPG diarahkan pada intinya agar Partai Golongan Karya memposisikan keberadaannya sebagai sejatinya sebuah partai politik. Oleh karena itu, sepanjang AMPG ada maka sepanjang itu Partai Golongan Karya berada, atau sepanjang Partai Golongan Karya berada,sepanjang itu pula AMPG memperlihatkan keberadaannya.

Oleh sebab itu, bentuk program tersebut harus memiliki muatan konsolidasi, kaderisasi, partisipasi dan komunikasi. Guna pencapaian tersebut, maka bentuk program Angkatan Muda Partai Golongan Karya harus berorientasi kepada :

1. Pemantapan konsolidasi visi, misi, dan strategi Angkatan Muda Partai Golongan Karya dalam garis pemikiran yang bersifat reformatif sebagai jawaban terhadap keinginan dan tuntutan Partai Golongan Karya guna meraih dan memantapkan kepercayaan rakyat terhadap Partai Golongan Karya.
2. Pemantapan hubungan dan membangun sinergitas dengan berbagai organisasi kepemudaan yang memiliki latar belakang kesejarahan yang sama (OKP Kekaryaan) secara internal dalam merespon berbagai tuntutan reformasi dalam segala bidang. Pemantapan tersebut, haruslah bersumber pada asas konsolidasi, kaderisasi, kemasyarakatan, kelompok kepentingan, dan basis-basis konstituen kepemudaan. Pemantapan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Hubungan Angkatan Muda Partai Golongan Karya dengan organisasi kepemudaan kekaryaan atau organisasi yang memiliki keterikatan historis yang sama terhadap Partai Golongan Karya dibangun pola keberhimpunan dalam hubungan yang bersifat aliansi strategis dan struktural koordinatif aspiratif terhadap pelaksanaan program-program elektoral, penciptaan konstituen baru;

- b. Hubungan Angkatan Muda Partai Golongan Karya dengan LSM-LSM dan organisasi-organisasi kepemudaan lainnya yang tidak memiliki keterikatan historis dibangun dalam prospektif program yang bersifat fungsional koordinatif;
 - c. Hubungan Angkatan Muda Partai Golongan Karya dengan dengan LSM-LSM dan organisasi-organisasi profesi dibangun dalam kerangka mengembangkan program-program yang berorientasi pada basis massa.
3. Pemantapan sebuah kelembagaan yang mengatur sistem kaderisasi yang permanen sebagai upaya memantapkan organisasi Angkatan Muda Partai Golongan Karya sebagai Organisasi Kader.
 4. Pemantapan kepercayaan masyarakat melalui pendekatan kepedulian terhadap masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan pemuda pada khususnya.

Disamping AMPG harus melakukan orientasi program dalam bentuk penajaman program, dalam perspektif untuk memantapkan kinerja organisasi khususnya yang berkaitan dengan implementasi program, agar dapat berjalan sesuai dengan kebijakan organisasi. Oleh karena itu beberapa pendekatan pelaksanaan program ditempuh upaya-upaya berikut :

1. Pendekatan pelaksanaan program bersifat crass programme dalam artian ada penugasan partai kepada organisasi Angkatan Muda Partai Golongan Karya sebagai konsekuensi logis posisi dan pola hubungan yang bersifat instruktif.

2. Pendekatan pelaksanaan program yang bersifat otonom dalam artian program yang dilaksanakan oleh Angkatan Muda Partai Golongan Karya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Pendekatan pelaksanaan program yang bersifat kemitraan dalam artian Angkatan Muda Partai Golongan Karya dapat melakukan kerjasama program dengan berbagai organisasi kemasyarakatan baik partai politik maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya

B. Teori Pendidikan Politik

1. Pendidikan Politik

Alfian dalam jurnal Nasiwan menyatakan bahwa pendidikan politik dimaknai sebagai usaha yang terencana, dengan sadar untuk memberikan penyadaran kepada warga negara yang sudah berhak memilih. Tujuan dari pendidikan politik yang terpenting adalah membentuk kesadaran warganegara tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi.

Pendidikan politik merupakan faktor penting bagi terbentuknya sikap politik warganegara yang mendukung berfungsinya sistem pemerintahan secara sehat. Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak di bangun (Alfian dalam jurnal Sunarso).

Manfaat pendidikan politik dapat melatih warganegara agar meningkatkan partisipasi politiknya. Huntington dalam jurnal Nasiwan mendefinisikan

partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Definisi ini mensyaratkan bahwa yang tercakup dalam partisipasi politik adalah kegiatan, dengan demikian orientasi-orientasi para warga negara terhadap politik, pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai politik kompetisi dan keefektifan politik, persepsi-persepsi tentang relevansi politik, itu seringkali juga tidak berkaitan.

Lewat pendidikan politik individu diajarkan bagaimana mereka mengumpulkan informasi dari berbagai media massa, diperkenalkan mengenai struktur politik, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga pemerintahan (Almond dan Verba dalam jurnal Sunarso). Jadi pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, bisa bersifat formal maupun informal, dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi, agar warganegara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab.

Seorang filsuf Politik terkemuka Aristoteles dalam karyanya yang monumental "*Politics*," pernah mengatakan bahwa manusia adalah "*Zoon Politicon*", atau makhluk Politik. Pandangan tersebut didasarkan pada fakta mengenai kondisi sosio-politis manusia yang hidup melalui adanya relasi politik dengan manusia lainnya. Suatu relasi politik dapat terwujud jika diantara manusia ada kesamaan kepentingan serta tujuan yang hendak dicapai bersama. Hubungan atas dasar kesamaan kepentingan serta tujuan politik inilah yang mendasari terbentuk kehidupan negara. Kenyataan bahwa negara terbentuk dari hubungan-

hubungan politik membawa dampak terjadinya proses politik sepanjang kelangsungan hidup negara. Karena itu, proses politik yang terjadi baik bentuk maupun intensitas tidak mungkin dihindari setiap warga dalam negara. Setiap warga negara pasti akan berhubungan atau bersinggungan dengan proses politik, entah itu disukai atau tidak disukai. Ini menunjukkan betapa proses politik memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan setiap warga dalam Negara.

Istilah pendidikan berasal dari kata *education* (pendidikan) yang berasal dari *educate* (mendidik) artinya memberi peningkatan (*to elicit, to give, rise to*) dan mengembangkan (*to elevate, to develop*). Dalam pengertian yang sempit Education atau pendidikan berarti perbuatan atau proses pembuatan untuk memperoleh pengetahuan. Menurut Poerwadarminta (1996:2006), kata pendidikan berasal dari kata “didik” yang dapat berarti “memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran sehingga dalam kata pendidikan itu mengandung beberapa arti, yaitu: 1) perbuatan (hal, caran sebagainya) mendidik; 2) (ilmu, ilmu didik, ilmu mendidik) mendidik; 3) pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya), badan, batin dan sebagainya.

Menurut Combs (1976:2) Pendidikan dapat dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- 1) Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang kita kenal dengan pendidikan sekolah yang bersifat teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas.
- 2) Pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang teratur dengan sadar dilaksanakan, tetapi

berlaku mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan tepat. 3) Pendidikan Informal, yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman-pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sejak seseorang lahir sampai mati, baik dalam pergaulan maupun dalam pekerjaan sehari-hari.

Sementara politik itu sendiri menurut pengertiannya Secara etimologi kata “ Politik ” berasal dari bahasa Yunani, yakni “Polis ”, yang dapat berarti kota atau negara kota. Dari kata polis ini kemudian diturunkan pada kata-kata seperti polites yang berarti warga negara; politicos (nama sifat) yang berarti kewarganegaraan (*civic*), politike techne yang berarti kemahiran politik dan politike episteme yang berarti Ilmu Politik, dan lain sebagainya. Kemudian Affandi (1971:50), berpendapat bahwa yang dimaksud dengan politik sebenarnya ialah usaha-usaha yang dijalankan oleh para warga negara untuk mencapai kekuasaan dalam negara. Selain itu terdapat definisi lain dari para sarjana, namun setidaknya unsur-unsur pokok politik pada dasarnya ialah menyangkut soal-soal negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pembagian atau alokasi. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Budiardjo (2008:16-17) disamping itu ada definisi lain yang bersifat pragmatis. Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya satu aspek atau unsur dari politik. Unsur ini diperlukan sebagai unsur pokok yang akan dipakai untuk meneropong unsur-unsur lain.

Istilah Pendidikan Politik berasal dari bahasa Inggris yaitu, *Political socialization*. Jika ditelusuri pada berbagai literatur politik yang ada Pendidikan Politik termasuk bagian proses sosialisasi politik. Walaupun berbeda secara

penulisan, baik sosialisasi politik maupun pendidikan politik mempunyai tujuan serta fungsi yang sama secara prinsip. Karena itu dalam dalam penulisan ini baik sosialisasi politik ataupun pendidikan politik dipergunakan bersama tanpa diperdebatkan.

Menurut Kantaprawira (2004:55), pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam system politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Selanjutnya untuk tujuan pendidikan politik bagi generasi muda dituangkan dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa: Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Tujuan utama yang dimiliki oleh pendidikan politik. Pertama, dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Kedua, bahwa dengan adanya pendidikan politik setiap individu tidak hanya sekedar tahu saja tapi juga lebih jauh dapat menjadi seorang warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang

ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik.

Di Indonesia pelaksanaan pendidikan politik mengacu pada dasar hukum konstitusi yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian seluruh materi pendidikan politik harus mengacu pada amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak terkecuali pada pelaksanaan bagi pendidikan politik generasi muda. Di Indonesia materi serta kurikulum bagi proses pendidikan politik generasi muda diatur dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyebutkan bahwa bahan pendidikan politik antara lain:

- a. Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara.
- b. Kehidupan dan kerukunan hidup beragama;
- c. Pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik;
- d. Kepercayaan pada pemerintah;

Demokrasi bukan merupakan situasi yang sudah selesai begitu saja, tetapi merupakan proses yang terus menerus berlanjut dan digarap tanpa henti-hentinya menuju ke arah kemajuan dan kebaikan. Oleh karena itu diperlukan pula demokratisasi pribadi manusianya dan demokratisasi lembaga-lembaga birokrasi dan aparat pemerintah agar tidak melaksanakan kebijakannya otoriter dan sewenang-wenang. Dengan demikian, demokrasi juga mengandung usaha memperbesar kekuasaan opini publik dan partisipasi politik rakyat. Serta ikut

melakukan pengawasan atau kontrol terhadap jalannya pemerintahan menuju ke pencapaian pemerintahan yang bersih.

Unsur pendidikan dalam pendidikan politik itu pada hakekatnya merupakan aktivitas pendidikan diri (mendidik dengan sengaja diri sendiri) yang terus menerus berproses di dalam person, sehingga orang yang bersangkutan lebih mampu memahami dirinya sendiri dan situasi-kondisi lingkungan sekitarnya. Kemudian mampu menilai segala sesuatu secara kritis, untuk selanjutnya menentukan sikap dan cara-cara penanganan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah lingkungan hidupnya. Dengan begitu pendidikan politik merupakan proses belajar bukan hanya untuk menambah informasi dan pengetahuan saja, akan tetapi lebih menekankan kemampuan mawas situasinya secara kritis, menentukan sikap yang benar, dan melatih ketangkasan aksi/ berbuat. (Kartono, 2009: 63-64)

2.1 Fungsi Pendidikan Politik

Betapa pentingnya pendidikan politik bagi semua warganegara Indonesia, maka menjadi harapan kita semua agar pendidikan politik yang diterapkan di Indonesia ini khas bersumber pada aspirasi yang digali dari kepribadian dan kekayaan spiritual bangsa sendiri dan telah disepakati secara nasional, demi tegaknya Republik Indonesia, dan demi tercapainya tujuan-tujuan politik negara, yang pada hakekatnya merupakan pencerminan murni dari harapan dan aspirasi bangsa/rakyat Indonesia.

Pendidikan politik disebut pula sebagai *political forming* atau *Bildung*. Disebut “forming” karena terkandung intensi untuk *membentuk insan politik* yang

menyadari status/kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut “Bindung” (pembentukan atau pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut menyangkut aktivitas : membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi *insan politik*. (Kartono, 2009: 63)

Fungsi pendidikan politik sangat penting sebab pendidikan politik meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik.

Merujuk pada beberapa pengertian pendidikan politik yang telah disebutkan sebelumnya, maka pendidikan politik mempunyai dua tujuan utama. Pertama, fungsi pendidikan politik adalah untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab. Kedua, fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik yang ingin diterapkan. Inti dari pendidikan politik adalah mengenai bagaimana rakyat direkrut dan disosialisasikan. Jadi, fungsi dari pendidikan politik adalah untuk menjelaskan proses perekrutan dan upaya sosialisasi kepada rakyat untuk mengerti mengenai peranannya dalam sistem politik serta agar dapat memiliki orientasi kepada sistem politik. Fungsi yang disampaikan di atas lebih menonjolkan fungsi pendidikan politik dalam mengubah tatanan masyarakat yang ada menjadi lebih baik dan lebih mendukung tercapainya proses demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan politik bagi individu antara lain adalah:

- a. Peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit social dan kedurjanaan.
- b. Di samping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat.

Fungsi pendidikan politik bagi individu yang tertera di atas tidak hanya mengubah individu tapi juga membentuk individu yang baru. Dalam artian bahwa seseorang individu dengan melalui pendidikan politik tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik tapi juga mempunyai kesadaran dan sensitifitas dalam berpolitik yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan yaitu dengan ikut berpartisipasi atau ditunjukkan dengan sikap dan perilaku politif yang lebih luas dalam usahanya untuk mencapai tujuan politik.

2.2 Landasan Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana. Pelaksanaan pendidikan politik, harus berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia. Secara tidak langsung pendidikan politik merupakan bagian integral dari keseluruhan pembangunan bangsa yang dilaksanakan sesuai dengan landasan yang telah mendasari kehidupan bangsa Indonesia.

Berdasarkan Inpres No. 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi Generasi Muda, maka yang menjadi landasan hukum pendidikan politik adalah:

- a. Landasan Ideologi yaitu Pancasila
- b. Landasan Konstitusi UUD 1945
- c. Landasan Operasional yaitu GBHN
- d. Landasan Historis yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pendidikan politik dalam UU No. 2 tahun 2008 pada BAB I Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi “Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”, diharapkan dapat membentuk warga negara yang berkepribadian utuh, berketerampilan, sekaligus juga berkesadaran yang tinggi sebagai warga negara yang baik (good citizen), sadar akan hak dan kewajiban serta memiliki tanggung jawab yang dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pencapaian tujuan pendidikan politik tersebut tidak dapat dilihat secara langsung namun memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan karena pendidikan politik berhubungan dengan aspek sikap dan perilaku seseorang. Dengan demikian pengembangan materi PKn bidang politik terutama mengambil porsi demokrasi politik dari ilmu politik. Porsi demokrasi politik dipahami dalam struktur ilmu politik yaitu baik sebagai pemikiran, filsafat, teori, ideologi dan terapannya dalam konstitusi dan sistem politik. Dan konsep, teori – teori ilmu politik yang lain yang dapat membantu

memahami demokrasi politik dalam rangka membentuk warga negara yang baik juga perlu dikembangkan seperti antara lain :

- a. *System theory* (dalam sosialisasi politik);
- b. *Citizenship politics* (Politik Kewarganegaraan)
- c. *Civic culture* (Budaya Politik Kewarganegaraan);
- d. *Citizen empowerment* (Pemberdayaan Warga Negara);
- e. *Civil society* (Masyarakat Kewarganegaraan).
- f. *Global Citizenship* (Kewarganegaraan Global).

Sedangkan pola pikir keilmuan politik, yang perlu dipahami untuk menunjang kompetensi profesional guru mata pelajaran PKn, diantaranya pendekatan yang dianut ilmu politik, seperti : pendekatan tradisional, perilaku, pascaperilaku (value and action), Marxis, neo –Marxis

2.3 Media Pendidikan Politik

Untuk menumbuhkan dan atau meningkatkan partisipasi politik yang otonom dari setiap warga negara, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar, mutlak diperlukan. Pelaksanaan pendidikan politik ini, selain dapat dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada, juga bisa dilaksanakan secara non-formal oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil. Pada konteks Indonesia, pelaksanaan pendidikan politik tidak bisa begitu saja diharapkan atau diserahkan kepada pemerintah, sebab: Pertama, berdasarkan pengalaman rezim yang pernah berkuasa di Indonesia, belum ada indikasi kuat bahwa pemerintah yang sementara berkuasa, akan konsisten untuk melaksanakan pendidikan politik. Kedua, pemerintahan Indonesia yang hingga

saat ini, belum mampu melahirkan suatu kebijakan penting dalam hal pendidikan politik bagi warga negara. Itu berarti, pendidikan politik, paling tidak untuk masa transisi (transisi dari rezim otoritarian menuju rezim yang demokratis) sekarang ini, akan lebih efektif dan maksimal jika dilaksanakan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil, diantaranya masyarakat politik yang tergabung dalam partai politik.

a. Partai Politik

Parpol melalui pendidikan politik memiliki peran dan nilai strategis dalam pembangunan karakter bangsa karena semua partai politik memiliki dasar yang mengarah pada terwujudnya upaya demokratisasi yang bermartabat.

b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai salah satu pendidik politik di Indonesia ternyata berperan lebih besar dalam mencerdaskan kesadaran politik masyarakat ketimbang parpol. Sudah banyak berdiri LSM yang berorientasi pada pengawasan kinerja pemerintahan dan pemilihan umum, yang paling tidak sudah dapat menjelaskan definisi demokrasi kepada masyarakat.

c. Media Massa

Media masa memiliki peran sangat penting dalam pembelajaran politik bagi masyarakat Indonesia, karena sejak era reformasi sekarang tidak ada pendidikan politik terstruktur yang dilakukan oleh Pemerintah, sehingga adanya kekhawatiran untuk dituduh melakukan indoktrinasi Politik seperti yang terjadi pada orde pemerintahan sebelumnya

d. Guru

Pendidikan politik bukan mengajarkan peserta didik tentang berapa kursi di DPR, melainkan memberikan pemahaman bahwa fungsi kekuasaan seperti bagaimana sharing dilakukan dan dimanfaatkan oleh wakil rakyat dan untuk siapa. Ketiga, pendidikan politik adalah mengembangkan melek politik atau kesadaran politik. Melek politik mempunyai hubungan dengan keterampilan, isu dan aksi penerapan politik yang demokratis, pendidikan kewargabangsaan yang dikaitkan dengan kesukarelaan untuk berbuat sesuatu di masyarakat.

2.4. Peran Pendidikan Politik dalam Masyarakat

Pendidikan politik harus bisa berkembang dalam kebebasan di tengah masyarakat sebagai gerakan kontra penuh humanisasi. Pendidikan politik juga harus berisikan ajaran untuk berani mendobrak banyak kepincangan di masyarakat yang menimbulkan kesengsaraan pada rakyat, mengarah tingkat demokrasi sejati dan demokrasi vital. Pendidikan politik juga mengembangkan daya kritis rakyat, di samping menunjukkan kemungkinan-kemungkinan untuk memfungsikan semua lembaga politik dan kemasyarakatan secara lebih pragmatis dan lebih efisien. Lebih singkatnya, Pendidikan politik harus bisa meningkatkan proses demokratisasi dari masyarakat bangsa. Masyarakat harus memaksimalkan hak mereka dalam berapresiasi, menyampaikan saran, dan pendapat serta bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dalam kehidupan berpolitik.

Pendidikan politik dalam bahasa pendidikan dinyatakan sebagai upaya belajar dan latihan mensistematikkan aktivitas sosial, dan membangun kebijakan-kebijakan terhadap sesama manusia di suatu wilayah negara. (Kartini Kartono, 2009: 68) Dimaksud sebagai upaya belajar karena pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Bahkan bisa disebut orang yang telah belajar politik kemudian berhenti belajar maka orang tersebut sudah tertinggal dari perkembangan politik, karena politik terus berkembang.

Kebijakan yang di maksud berupa : pengembangan sportivitas, bertingkah laku baik, jujur, solider dan toleran terhadap bangsa sendiri. Bersikap kooperatif dan praktis, mampu bekerjasama dalam kelompok, jujur dan lain-lain. Pendidikan politik identik dengan pembentukan hati nurani politik, yang di dalamnya secara implisit mencakup rasa tanggung jawab etnis terhadap sesama warganegara.

alternatif yang menguntungkan bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dengan mendapatkan pendidikan politik, massa rakyat diharapkan bisa menjadi kreatif, kritis, mandiri dan partisipatif bila kepadanya diberikan kesempatan untuk berperilaku demokratis. Oleh karena itu dia diajar untuk bersikap jujur dan berani, serta sanggup mempertanggung jawabkan kejadian-kejadian yang terjadi di negaranya, di samping ikut menentukan norma-norma yang sepatutnya

jadi panutan umum. Dengan mendapatkajn Pendidikan politik masyarakat diharapkan bisa menjadi kreatif, kritis, mandiri otonom, mantap dan partisipatif bila kepadanya diberikan kesempatan untuk berperilaku demokratis. (Kartono, 2009: 79)

Pendidikan politik menumbuhkan skeptisisme politik dan kearifan wawasan politik mengenai peristiwa-peristiwa politik dengan segala jaringan-jaringannya. Dengan begitu orang mampu menjalankan fungsi kontrol politik, verifikasi (pembuktian) terhadap realitas politik yang tengah berlangsung. Skeptisisme harus diartikan sebagai skeptisisme ilmiah, menghindari rasa mudah percaya dan sikap naif tidak kritis; yaitu gampang percaya dan meyakini “kebenaran” mitos-mitos politik, doktrin-doktrin politik dan propaganda politik yang semuanya brsifat melenakan aya kognitif (pengenalan). (Kartono, 2009: 79).

Pendidikan politik mendorong orang untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap jaringan-jaringan politik dan kemasyarakatan menganalisis dan membahas konflik-konflik aktual dengan kemampuan yang dimiliki rakyat sendiri. Dengan demikian orang menyadari hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang baik untuk mengatur masyarakat, negara dan pemerintahan.

Dengan pendidikan politik bukan hanya pemahaman peristiwa-peristiwa politik dan konflik yang diutamakan, akan tetapi orang justru menekankan aktivitas politik secara sadar dan benar sesuai dengan azas-azas demokrasi sejati. Politik itu bukan monopoli para pemimpin, kaum

berduit atau kelompok-kelompok istimewa privileged saja. Akan tetapi politik itu merupakan milik bersama bagi setiap warganegara. Kartono, 1996: 57).

Politik dan negara bukan hanya masalah teoretis, fiksi yuridis, atau urusan abstrak dan idealistik, akan tetapi betul-betul merupakan kenyataan telanjang dan fakta keras-kejam, penuh unsur kontroversial atau kontradiktif dan konflik-konflik tajam. Maka yang penting bagi kita semua adalah bukan menetapkan formalitas-formalitas resmi dan banyak preskripsi yuridis, akan tetapi apakah proses demokratisasi yang tersirat dalam sila ke empat pancasila kita sudah ditarapkan dengan benar atau belum di tengah kenyataan hirup sehari-hari.

Pendidikan politik banyak membahas konflik-konflik aktual. Dan lewat Pendidikan politik akan diperoleh kemampuan rakyat untuk menganalisa bermacam-macam konflik tadi, serta ikut memecahkan dengan cara rakyat itu sendiri; bukan dengan cara-cara yang ditekankan dari “atas”. Dengan demikian orang menyadari hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang baik untuk ikut mengatur masyarakat sekitar, negara dan pemerintahan. (Kartono, 2009: 81).

Menjadi semakin jelas bagi kita, bahwa politik itu bukan monopoli para pemiimpin, kaum berduit dan kelomok-kelompok istimewa privileged saja. Akan tetapi politik itu merupakan milik bersama, berupa garapan bersama bagi setiap warganegara untuk dipahami, dimanfaatkan, dan dipakai sebagai alat untuk mewujudkan kaedilan sosial serta kesejahteraan

materi-spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia dan bukan kesejahteraan bagi sekelompok kecil kaum elite penguasa serta para konglomerat saja.

2.5.Kewarganegaraan dan Peranan Politik

Arah pendidikan politik yaitu menuju ke arah transparansi atau keterbukaan dan kebebasan. Orang tidak ingin menunjukkan jalan kepada pribadi lain, akan tetapi membantu orang lain tadi menemukan dan melewati jalannya sendiri dan visi kemasyarakatan yang terbuka. Pandangan hidup terbuka itu menonjolkan kebebasan manusia untuk merealisasikan diri sendiri, dikaitkan dengan relasi personalnya dengan masyarakat sekitar. Karena itu individualisme , demokratisasi, kebebasan personal dan orde sosial yang maju itu saling bertalian tidak bisa dipisah-pisahkan.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, pendidikan politik menyatakan bahwa untuk menentukan apakah masyarakat itu bisa betul-betul maju dan berkembang atau justru tidak bisa berkembang. Masyarakat bisa menjadi wujud bagi diri sendiri yang bebas dan otonom yang mempunyai kemampuan dan wewenang untuk ikut menentukan macam-macam ketetapan sosial, politik dan kultural. Juga berpartisipasi konstruktif dalam pengembangan masyarakat dan lembaga-lembaga politik.

Pendidikan politik di masa sekarang mempunyai tujuan pokok ialah : partisipasi politik rakyat (politische Beteiligung), keterpihakan dalam konflik umum terbuka, dan keikutsertaan untuk menentukan kebijakan-kebijakan umum. Maka keberanian menentukan pendirian sendiri secara otonom itu sangat diutamakan dalam pendidikan politik untuk menentukan arah

perjuangan politik di tengah banyak konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan-kepentingan. (Kartono, 2009: 86).

Pendidikan politik menanamkan nilai dan norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta menjadi dasar nilai untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengetahuan tentang kehidupan berpolitik sangat diperlukan bagi seluruh warganegara di masa mendatang untuk dapat menjawab tantangan kehidupan dan konflik-konflik yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin kompleks. Melalui pendidikan politik diharapkan bangsa Indonesia secara dini dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang bersumber dari berbagai ideologi politik yang tidaksesuai dengan landasan dasar negara kita yaitu Pancasila dan UUD 1945.

2.6.Fungsi Belajar Politik Dan Pertanggung jawaban Politik bagi Masyarakat

Sedikit atau banyak pendidikan politik itu merupakan aktivitas agogis yang terlembagakan, yang secara sistematis dan intensional berusaha mendorong peserta (siswa, orang dewasa, rakyat) untuk berpartisipasi politik lebih aktif lagi dalam membangun lembag-lembaga kemasyarakatan dan politik, dan membangun budaya bangsa. Maka pendidikan politik itu megajukan appel terhadap pertanggungjawaban rakyat untuk ikut menata masyarakat lingkungan sendiri dan masyarakat negara. Juga menuntut dilaksanakannya kewajiban-kewajiban selaku warganegara untuk membangun

tanah air, di samping mendapatkan hak-haknya yang wajar-wajar, yaitu untuk membuat “bangunan-bangunan dan bentuk-bentuk” baru di tengah lingkungan budaya bangsa sendiri. Semua aktivitas itu dilakukan secara bertanggung jawab dalam ikatan-ikatan hidup bersama secara gotong royong atau kolektif, atas dasar:

- a. Kesukarelaan disertai ketulusan-ikhlas, dan
- b. Keterlibatan/ketrsangcutannya selaku warga negara di medan politik, yang dianggap sebagai misi (amanat) hidup yang harus dilaksanakan di tengah satu budaya politik tertentu. (Kartono, 2009: 94)

Dengan demikian pendidikan politik yang berlangsung di tengah budaya politik itu selalu berkaitan dengan : bidang sosial, ekonomi, seni, ilmu pengetahuan, moral nilai-nilai spiritual dan kesusilaan. Maka kultur dan budaya politik itu merupakan manifestasi atau ungkapan dari kegiatan-kegiatan manusia yang terus-menerus berkreasi, sehingga selalu terjadi gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan, yang kita kenal sebagai “peristiwa epochal” (peristiwa zaman, kejadian dalam kurun waktu). Artinya, dunia politik itu secara terus menerus mengalami pergeseran dan perubahan dan pada akhirnya memberikan kualitas tertentu pada susunan masyarakatnya, yang dihayati orang secara berbeda-beda pula. (Kartono, 2009: 94).

Maka pluriformitas (keanekaragaman) bentuk-bentuk kehidupan politik dengan perbedaan norma-norma dan valensi yang dianut manusia itu memberikan alas dasar yang kuat untuk memunculkan satu skala besar

keanekaragaman organisasi (struktur dan kelembagaan, asas tujuan dan cara-cara bekerja atau pencapaiannya). Sebagai konsekuensinya juga akan dimunculkan bermacam-macam bentuk kerjasama dan beranekaragam konflik politik dunia.

4. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Peraturan perundang-undangan di bidang politik (*the laws of politics*) sebagai penjabaran dari konstitusi yang baru. Undang-Undang politik yang lahir masa transisi yakni: (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD; serta (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selain perubahan atas struktur ketatanegaraan Indonesia, reformasi juga menyangkut dua perubahan penting lainnya, yakni mekanisme dan prosedur pengisian jabatan dalam struktur ketatanegaraan; serta instrumen politik yang digunakan. Dua instrumen politik penting yang menjadi kebijakan yakni pemilihan umum yang demokratis serta kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi (*decentralisation*). Dan salah satu langkah fundamental dalam kebijakan desentralisasi yakni pelaksanaan pemilihan umum lokal dalam memilih

kepala daerah (pilkada). Kebijakan ini merupakan hal yang sangat fundamental sebagai kelanjutan dari arus perubahan yang sangat kuat terutama sejak Tahun 1996. Nordholt menyebutnya sebagai *the consolidation of electoral democracy*, karena berlangsungnya pemilu yang secara luar biasa di tingkat kabupaten/kota (*regional/district level*), provinsi dan nasional yang berlangsung sejak Tahun 1999, 2004 dan 2005. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dengan demikian merupakan proses politik yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis (melalui pemilu); tetapi juga sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sesungguhnya. Keduanya merupakan reaksi atas model penyelenggaraan pemilu Rezim Orde Baru yang tidak demokratis dan kekuasaan yang sentralistik.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih populer disingkat menjadi Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota. Hampir semua Daerah di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, kini telah mengadakan proses pemilihan kepala daerah baik di Propinsi, maupun kabupaten/kota sesuai amanat undang-undang tersebut. Diaturnya pemilihan kepala daerah dalam merupakan pertanda bahwa hal tersebut telah menjadi konsensus nasional

Peraturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung juga telah dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Untuk menyempurnakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

3.1 Sejarah Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada langsung di Indonesia produk reformasi yang dimulai 2005 sering dikatakan sebagai “lompatan demokrasi”. Istilah ini bisa diartikan positif maupun negatif. Dalam pengertian positif, pilkada langsung merupakan sarana demokrasi untuk memberi kesempatan kepada rakyat sebagai infrastruktur politik untuk memilih kepala daerah secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara. Sarana ini akan membuat keseimbangan dengan suprastruktur politik, karena melalui pemilihan langsung rakyat dapat menentukan jalannya pemerintahan dengan memilih pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan rahasia. Meskipun rakyat tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan pemerintah sehari-hari, mereka dapat melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan yang sudah mendapat mandat langsung dari rakyat. Amirudin dan Zaini Bisri, (2006: 5).

Reformasi merupakan satu langkah demokrasi yang terlahir di Indonesia setelah lebih dari 10 tahun terakhir lepas dari masa orde baru yang sangat terkenal dengan era diktator. Masa-masa reformasi merupakan masa yang sangat berat bagi negara kita ini, masa dimana terjadinya perubahan sistem dan suasana yang

berbeda dengan zaman era orde baru, oleh sebab itu dalam hal ini Indonesia akan dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang sangat kompleks sekali terutama yang sesuai dengan judul yaitu tentang pemilu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan pemilu dan demokrasi merupakan salah satu persoalan yang sangat mendapatkan tanggapan serius oleh seluruh elemen bangsa ini. Peran aktif masyarakat dalam pemilu ini sangat dibutuhkan sekali kesadaran berdemokrasi yang tinggi merupakan salah satu faktor utama yang sangat penting.

Pemilihan umum yang terjadi pada saat ini sangat berbeda dengan pada saat orde baru, dimana pada saat orde baru masyarakat tidak bisa memilih pimpinan daerahnya sesuai dengan hati nuraninya karena masih menggunakan sistem perwakilan dari partai namun di era reformasi ini masyarakat dapat menentukan pilihannya sesuai dengan hatinya masing-masing. Namun dengan diadakannya pemilu secara langsung ini masih banyak sekali ditemukan berbagai persoalan serta berbagai penyimpangan yang terjadi mulai dari daftar pemilih tetap, masalah administrasi bakal calon, yang sangat miris sekali banyaknya money politik yang masih terjadi disana sini. Paska Pemilihan Presiden bulan Juli yang lalu Indonesia menjadi sorotan dunia terkait proses pemilu yang demokratis yaitu dengan melakukan pemilihan umum secara langsung yang dilakukan oleh rakyatnya. Yang membanggakan, sorotan yang diberikan positif memuji demokrasi Indonesia yang semakin matang. Pemilu berjalan damai dan berlangsung lancar. Satu hal lagi yang penting ke depannya adalah rakyat tetap mendapat hak (privilege) untuk memilih langsung

pemimpinnya. Namun pada saat ini rakyat mulai terganggu dengan adanya RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dimana hak rakyat untuk memilih langsung Gubernur dan Walikota/Bupatinya akan dirampas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini tertuang dalam RUU Pilkada BAB 2 (Pemilihan Gubernur) mulai Pasal 2 dan BAB 3 (Pemilihan Walikota/Bupati) mulai Pasal 47. Dengan adanya pemilihan umum adalah salah satu nilai demokrasi dapat terwujud, artinya terjadinya perpindahan kekuasaan negara dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru secara damai

C. Pendidikan Politik untuk Menghadapi Pilkada serentak di Kota Makassar

1. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik dimaknai sebagai usaha yang terencana, dengan sadar untuk memberikan penyadaran kepada warga negara yang sudah berhak memilih. Tujuan dari pendidikan politik yang terpenting adalah membentuk kesadaran warganegara tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi. Pendidikan politik merupakan faktor penting bagi terbentuknya sikap politik warganegara yang mendukung berfungsinya sistem pemerintahan secara sehat. Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak di bangun (Alfian dalam jurnal Sunarso).

Manfaat pendidikan politik dapat melatih warganegara agar meningkatkan partisipasi politiknya. Huntington dalam jurnal Nasiwan mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Definisi ini mensyaratkan bahwa yang tercakup dalam partisipasi politik adalah kegiatan, dengan demikian orientasi-orientasi para warga negara terhadap politik, pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai politik kompetisi dan keefektifan politik, persepsi-persepsi tentang relevansi politik, itu seringkali juga tidak berkaitan.

Jadi pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, bisa bersifat formal maupun informal, dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi, agar warganegara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab.

2. Fungsi Pendidikan Politik

Betapa pentingnya pendidikan politik bagi semua warganegara Indonesia, maka menjadi harapan kita semua agar pendidikan politik yang diterapkan di Indonesia ini khas bersumber pada aspirasi yang digali dari kepribadian dan kekayaan spiritual bangsa sendiri dan telah disepakati secara nasional, demi tegaknya Republik Indonesia, dan demi tercapainya tujuan-tujuan politik negara, yang pada hakekatnya merupakan pencerminan murni dari harapan dan aspirasi bangsa/rakyat Indonesia.

Pendidikan politik disebut pula sebagai *political forming* atau *Bildung*. Disebut “forming” karena terkandung intensi untuk *membentuk insan politik* yang menyadari status/kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut “Bindung” (pembentukan atau pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut menyangkut aktivitas : membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi *insan politik*. (Kartono, 2009: 63)

Pendidikan politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa. Pendidikan macam ini tidak menonjolkan proses kultivasi individu menjadi “intelektual politik” yang bersinggasa dalam menara gading keilmuan, atau menjadi pribadi kritis dan cerdas “yang terisolasi” dari masyarakat lingkungannya. Akan tetapi lebih menekankan relasi individu dengan individu lain, atau individu dengan masyarakatnya di tengah medan sosial; dalam satu konteks politik, dengan kaitannya pada aspek-aspek sosial-ekonomi-budaya; di tengah situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan, atau oleh adanya pluriformitas (kemajemukan budaya). (Kartono, 2009: 63)

3. Peran Pendidikan Politik Dalam Masyarakat

Pendidikan politik harus bisa berkembang dalam kebebasan di tengah masyarakat sebagai gerakan kontra penuh humanisasi. Pendidikan politik juga harus berisikan ajaran untuk berani mendobrak banyak kepincangan di masyarakat yang menimbulkan kesengsaraan pada rakyat, mengarah tingkat demokrasi sejati dan demokrasi vital. Pendidikan politik juga

mengembangkan daya kritis rakyat, di samping menunjukkan kemungkinan-kemungkinan untuk memfungsikan semua lembaga politik dan kemasyarakatan secara lebih pragmatis dan lebih efisien. Lebih singkatnya, Pendidikan politik harus bisa meningkatkan proses demokratisasi dari masyarakat bangsa. Masyarakat harus memaksimalkan hak mereka dalam berapresiasi, menyampaikan saran, dan pendapat serta bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dalam kehidupan berpolitik.

Pendidikan politik dalam bahasa pendidikan dinyatakan sebagai upaya belajar dan latihan mensistematisasikan aktivitas sosial, dan membangun kebijakan-kebijakan terhadap sesama manusia di suatu wilayah negara. (Kartono, 2009: 68) Dimaksud sebagai upaya belajar karena pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Bahkan bisa disebut 19 orang yang telah belajar politik kemudian berhenti belajar maka orang tersebut sudah tertinggal dari perkembangan politik, karena politik terus berkembang.

4. Strategi LSM dalam Pendidikan Politik

Secara etimologi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, *strategos*. Adapun *strategos* dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer” pada zaman demokrasi Athena. Pada mulanya istilah *strategos* digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah

mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk mencapai suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai sasaran. Strategi mengenai kondisi dan situasi dalam proses publik merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, tidak terkecuali dalam proses pelayanan yang baik kepada masyarakat. Strategi menurut Purnomo, (2012) sebenarnya berasal dari bahasa Yunani “strategos” diambil dari kata *stratos* yang berarti militer dan *Ag* yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai general ship yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang. Jadi untuk sementara dapatlah kita simpulkan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

LSM pada era reformasi bekerja secara lebih kondusif sebagai institusi pemberdayaan masyarakat dan instrumen pendidikan politik. Bentuk kegiatan yang dilakukan LSM meliputi workshop, diskusi politik, pencetakan kader gerakan, mobilisasi aksi, ataupun kampanye opini publik. Beberapa lembaga swadaya masyarakat beranggapan bahwasumber keterbelakangan dan kemiskinan adalah ketidakadilan tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, beberapalembaga swadaya masyarakat pada era reformasi, berfokus pada penyadaran politik, pengorganisasian rakyat, mobilisasi aksi, dan membangun

jaringan advokasi Budiarto, (2008: 391). Pada dasarnya cita-cita LSM menumbuhkan keswadayaan masyarakat menuju dunia yang lebih manusiawi dan demokratis, penindasan dunia harus di hapuskan di muka bumi, sehingga semua orang harus punya kemandirian dalam mengambil keputusan yang menyangkut perubahan dalam dirinya. Dalam menciptakan masyarakat yang manusiawi dan demokratis serta mewujudkan dunia yang lebih baik maka sudah tentu LSM berpihak pada masyarakat yang lemah dan kaum miskin yang tersingkir, tertindas dan sering di abaikan dalam pengambilan keputusan baik local maupun nasional. Pemihakan ini diwujudkan dalam bentuk pendampingan bagi masyarakat tertindas.

Seiring dengan proses pemilihan Presiden secara langsung, di berbagai daerah provinsi dan kabupaten/kota juga dilaksanakan pemilihan secara langsung sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pemilihan langsung di pusat maupun di daerah memberikan kedaulatan yang sesungguhnya kepada rakyat, dan sekaligus telah mengurangi hak parlemen dalam hal memilih Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Rakyat yang pada masa Orde Baru dibungkam hak-hak politiknya, walaupun ada adalah partisipasi politik yang dimobilisasi oleh pemerintah, mulai merasakan eforia politik pada masa reformasi. Seiring dengan perluasan hak-hak politik yang dibangun dari demokrasi baru Indonesia, rakyat secara bebas tanpa ada tekanan dapat memilih siapa pun yang diinginkan untuk menjadi presiden, gubernur, bupati, ataupun walikota.

D. Pemilihan kepala Daerah (Pemilukada)

Hakekat pemilihan umum adalah suatu proses dimana rakyat mentransfer kedaulatan kepada wakil-wakilnya. Ada dua aspek dalam pemilihan umum, aspek pertama adalah penggunaan kedaulatan rakyat secara langsung, kedua adalah memilih wakilnya sekaligus mentransferkan pelaksanaan kedaulatan itu mewakili perwakilan. Hakekat pemilihan umum adalah suatu proses dimana rakyat mentransfer kedaulatan kepada wakil-wakilnya. Ada dua aspek dalam pemilihan umum yaitu, penggunaan kedaulatan rakyat secara langsung yang kedua adalah memilih wakilnya dan sekaligus mentransfer pelaksanaan kedaulatan itu melalui perwakilan. Pemilihan umum adalah bagian dari penggunaan hak yang dimiliki oleh rakyat. Untuk itu, berbicara tentang pemilihan umum tidak bisa dilepaskan dari pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” pemilihan umum adalah the real proses yang mana rakyat menggunakan haknya.

Teori pembilahan sosial dalam sosiologi dan ilmu politik menjelaskan tentang bagaimana masyarakat dibagi menjadi kelompok. Lipset dan Rokkan, mengutarakan bahwa pembilahan sosial, harus memenuhi tiga syarat. Pertama, harus ada divisi dalam masyarakat berdasarkan faktor demografi atau sosial ekonomi tertentu. Contoh faktor tersebut adalah kelas, pekerjaan, kelompok etnis dan agama yang dianut. Karakteristik ini untuk memisahkan mereka dari anggota masyarakat lainnya. Kedua, orang pada satu sisi kesenjangan sosial harus menyadari bahwa karakteristik obligasi mereka bersama-sama, dan mereka harus menunjukkan kemauan untuk bertindak mempromosikan kepentingan yang terkait

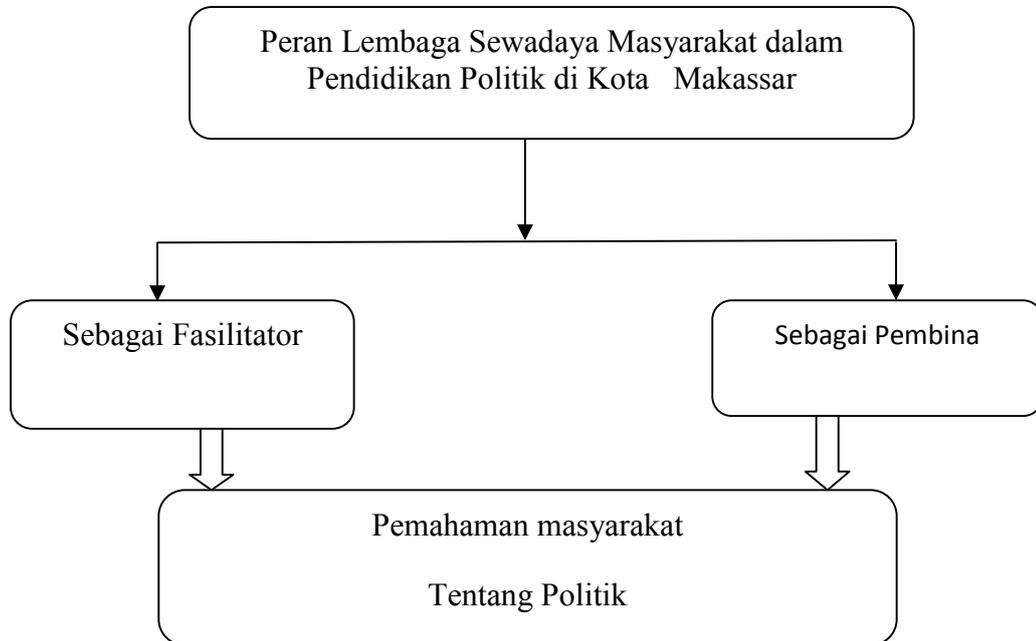
dengan identitas sosial mereka. Himar, S.IP dari LSI territorial Sulawesi Selatan mengatakan bahwa: “Konflik pemilukada di Kota Makassar dari segi pembilahan sosial yang ada, kecil kemungkinannya untuk terjadi konflik. Tapi hal ini perlu mendapatkan perhatian, melihat kecenderungan beberapa konflik sosial di luar pemilukada yang terjadi di Kota Makassar seringkali dilatarbelakangi oleh sentimen kedaerahan.” Apa yang di katakan oleh informan tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya basis sosial yang berbeda di tengah masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab konflik ketika hal tersebut dijadikan isu oleh tim pemenangan kandidat calon walikota untuk meraih dukungan suara. Sebab jika pembilahan sosial ini dalam titik yang ekstrim bisa memicu ke arah konflik sosial yang besar

Demokrasi yang terbuka memberikan ruang kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung. Membuka kesadaran primordial bagi masyarakat tertentu untuk menunjuk seseorang dari kelompoknya untuk menjadi kepala daerah. Serta membuka ruang bagi para elit politik membangun isu primordial untuk memobilisasi pilihan masyarakat etnik tertentu kepadanya. Daerah yang plural ditambah dengan kondisi kota yang akan melaksanakan pemilukada memang konflik cenderung besar terjadi dalam interaksi masyarakat di kehidupan sehari-hari karena relasi etnik dan pemilukada akan saling mempengaruhi. Meskipun di Makassar tidak terjadi konflik fisik dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang diarahkan dalam penelitian ini adalah, bahwa Reformasi merupakan satu langkah demokrasi yang terlahir di Indonesia setelah lebih dari 10 tahun terakhir lepas dari masa orde baru yang sangat terkenal dengan era diktator. Masa-masa reformasi merupakan masa yang sangat berat bagi negara kita ini, masa dimana terjadinya perubahan sistem pemilihan kepala daerah, oleh sebab itu dalam hal ini Indonesia akan dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang sangat kompleks sekali terutama yang sesuai dengan judul yaitu tentang strategi LSM dalam pendidikan politik untuk menghadapi pemilu yang serentak di kota Makassar, dimana masyarakat sebagai pemilih rentan akan terjadinya politik yang tidak berorientasi pada nilai-nilai dan etika dalam politik itu sendiri, sehingga LSM sebagai lembaga swadaya masyarakat diuntut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait politik yang melenceng dari nilai-nilai etika politik itu sendiri, sehingga melalui pendidikan politik diharapkan masyarakat bisa berkontribusi pemilu yang tertib dan aman seperti yang diharapkan semua orang.

Gambar Bagan Kerangka Pikir:



F. Fokus penelitian

Pendidikan politik tidak akan terlaksana tanpa adanya penyelenggaraan yang dilakukan secara nyata di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan politik tentu nya akan berkaitan erat dengan bentuk pendidikan politik yang akan d iterapkan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Dengan demikian,bentuk pendidikan politik mana yang akan diterapkan dalam mendukung terlaksananya pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting bagi pemerin tahan suatu Negara, pada umumnya pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di dalam sebuah Negara salah satunya adalah pendidikan politik.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini adalah :

1. pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik
2. Sosialisasi Pendidikan politik adalah merupakan suatu proses pembentukan sikap dan orientasi politik setiap anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan politik di dalam suatu negara. Proses sosialisasi berlangsung tidak hanya menjelang pemilu tetapi bahagian dari kehidupan sehari-hari diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal seperti sekolah dan instansi-instansi pendidikan lainnya, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari pada setiap anggota masyarakat, baik dalam kehidupan keluarga masyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Faktor Pendukung Pengawasan yaitu tersedianya sarana dan prasarana untuk melakukan proses pendidikan dan juga dalam sosialisasi pendidikan politik di tengah tengah masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian akan di lakukan selama dua bulan, dan daerah penelitian ini adalah Kota Makassar yang di fokuskan pada Kecamatan Manggala yang mana Lembaga Swadaya yang di maksud adalah Angkatan Mudah Partai Golkar (AMPG)

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi dilapangan pada masing-masing variabel objek penelitian serta menarik kesimpulan mengenai apa yang hendak diperoleh dari penelitian ini. Kemudian peneliti akan mendeskripsikan dan menjelaskan.

C. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari pihak-pihak terkait yang mengetahui persis keadaan dan kondisi lapangan saat itu, data bisa berupa informasi kejadian, berkas-berkas penting, foto, media cetak ataupun pengetahuan umum mengenai permasalahan pengawasan tersebut. Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Data primer

Data primer biasa juga disebut data empiris atau data yang bersifat langsung yaitu data yang di peroleh dengan cara obserpasi, wawancara secara langsung di Kecamatan Manggala kota Makassar.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari laporan-laporan, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen arsip tertentu yang berhubungan dengan peran LSM dalam Pendidikan polotik di kota Makassar khususnya di Kecamatan Manggala..

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan antara lain :

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung pada lokasi/daerah penelitian untuk menjawab permasalahan yang diangkat, dalam hal ini pemberdayaan masyarakat yang ada dalam zona taman nasional.
2. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung dengan masyarakat dan (LSM) terkait yang ada di Kota Makassar
3. Dokumentasi yaitu, cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berupa dokumen baik dokumen tertulis maupun hasil gambar, dukumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan, data yang diperoleh dari dokumen ini bias digunakan untuk melengkapi bahkan memperkuat data dari hasil wawancara dan obsevasi.

E. Penentuan Populasi dan Teknik pengambilan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek yang berfungsi sebagai informan atau objek yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan pokok permasalahan. Menurut Arikunto dalam Martmono (2013) “populasi diartikan seluruh objek penelitian”. Populasi penelitian ini adalah masyarakat pulau komodo yang ada dalam kawasan zona taman nasional yang diberdayakan.

Metode pengambilan sampel yang digunakan ada dua antara lain:

1. *Accidental sampling (Pengambilan sampel tidak di sengaja)*

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Seperti dalam penelitian ini sampel sumber datanya adalah masyarakat yang diberdayakan.

2. *Purposive sampling (Pengambilan sampel secara sengaja)*

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu seperti penilaian terhadap sampel yang dipandang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Metode Analisis

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Dimana teknik analisis ini digunakan untuk menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Pendirian Organisasi AMPG

Posisi Angkatan Muda Partai Golkar yang lahir pada tanggal 11 Februari 2002 merupakan tuntutan kebutuhan partai tentang perlunya sayap pemuda partai GOLONGAN KARYA. Kehadiran AMPG sebagai pemuda partai GOLONGAN KARYA karena bukan sebuah `rekayasa` untuk kepentingan jangka pendek partai. Tetapi ia merupakan p[erwujudan tekad Partai GOLONGAN KARYA untuk berada dalam kehidupan kepemudaan dan masyarakat Indonesia guna merealisasikan misi perjuangan Partai GOLONGAN KARYA demi kemajuan dan kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. AMPG juga menjadi bagian yang sangat penting untuk mencapai visi partai khususnya dalam melaksanakan catur sukses partai, terutama catur yang kedua, yakni Sukses Kaderisasi, yaitu dengan memperluas basis partai untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya kader-kader baru sebagai produk sistem perkaderan yang akan dilaksanakan. AMPG sebagai Organisasi Sayap Kepemudaan akan diarahkan untuk dapat menciptakan konstituen baru dengan melakukan penggalangan secara aktif terhadap generasi muda.

Dalam Anggaran Dasar Partai GOLONGAN KARYA adalah sebagai bagian dari Partai GOLONGAN KARYA BAB X Pasal 25 dan Anggaran Rumah Tangga BAB VII Pasal 21 tentang Organisasi Sayap, dibentuknya

sayap pemuda Partai GOLONGAN KARYA dan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Partai GOLONGAN KARYA.

Dasar pemikiran organisasi saya AMPG adalah

Pertama, Sebagai sayap kepemudaan Partai GOLONGAN KARYA dituntut memainkan peran penting dalam menjawab masalah-masalah, tantangan dan kebutuhan Partai GOLONGAN KARYA dalam usaha menyahtuti perjuangan Partai GOLONGAN KARYA sesuai visi-misi Partai GOLONGAN KARYA kedelapan.

Kedua, sebagai bagian dari Partai GOLONGAN KARYA, sayap kepemudaan Partai GOLONGAN KARYA meletakkan kegiatannya pada penggalangan massa kepemudaan nasional dan bergerak sebagai kekuatan yang mempunyai posisi strategis dalam melakukan kegiatan-kegiatan dengan semangat perjuangan sebagai sayap Partai GOLONGAN KARYA ditengah-tengah masyarakat serta melakukan kegiatan dalam membela kemajuan partai serta hidup matinya partai.

Ketiga, AMPG sebagai Organisasi Sayap akan menjadi wadah untuk mensinergikan seluruh gerakan dan potensi pemuda dengan mengintegrasikan seluruh organisasi kepemudaan yang berada dilingkungan Partai GOLONGAN KARYA (OKP Kekaryaan)

Dengan demikian posisi AMPG dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama,

Angkatan Muda Partai Golongan Karya berkedudukan pada seluruh jajaran kepengurusan Partai GOLONGAN KARYA dari tingkat pusat sampai ke

tingkat kelurahan. Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golongan Karya dijabat secara ex-officio oleh Ketua / Korbid Pemuda Partai Golongan Karya. Struktur Angkatan Muda Partai Golongan Karya diatur secara tersendiri dalam pengaturan tentang Kelembagaan Angkatan Muda Partai Golongan Karya melalui sebuah peraturan Organisasi (PO) Nomor: PO-01/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang organisasi sayap Angkatan Muda Partai Golongan Karya.

Kedua,

Angkatan Muda Partai Golongan Karya sebagai organisasi sayap Partai Golongan Karya menjadi bagian dari Partai Golongan Karya (embodied) pada semua tingkat Dewan Pimpinan Partai. Karena itu AMPG tidak memiliki AD/ART sendiri dan secara internal diatur dalam PD/PRT yang mengacu pada AD/ART Partai Golongan Karya; memiliki Pedoman Organisasi dan doktrin yang merupakan doktrin Partai Golongan Karya. Oleh karenanya program Kepemudaan Partai Golongan Karya dan program terkait lainnya diseluruh jajarannya adalah program yang dilaksanakan oleh AMPG.

Ketiga,

Angkatan Muda Partai Golongan Karya menjadi wadah berhimpun dari seluruh organisasi kepemudaan, baik organisasi kepemudaan yang dibentuk oleh kino, yang mendirikan Partai Golongan Karya; yang didirikan oleh Partai Golongan Karya; dan yang secara historis menyalurkan aspirasinya kepada Partai Golongan Karya (OKP Kekaryaan), dimana ketua umum dari

seluruh OKP Kekaryaannya tersebut secara *ex officio* menjadi Ketua Pimpinan AMPG pada setiap tingkatannya. Kewberhimpunan seluruh organisasi kepemudaan kekaryaannya ini akan menjadi sinergis dengan dilakukannya sinkronisasi kebijakan dan koordinasi pelaksanaan program serta gerakan yang berorientasi kepada peningkatan dampak positif terhadap Partai Golongan Karya.

Keempat,

Angkatan Muda Partai Golongan Karya, merupakan sumber utama perkaderan generasi muda Partai Golongan Karya (*Cadre forming*) dan sekaligus bagian dari sumber rekrutmen kader Partai Golongan Karya ke masa depan (*Cadre Promotion*). Dan bahkan seharusnya AMPG memosisikan diri sebagai sumber kader, baik sebagai sumber kader partai maupun sebagai sumber kepemimpinan bangsa untuk melanjutkan kepemimpinan Partai Golongan Karya.

Kelima,

Angkatan Muda Partai Golongan Karya, merupakan organisasi yang diharapkan dapat mendinamisasi struktur Partai Golongan Karya dan tuntutan perkembangan dan dinamika politik nasional. Partai Golongan Karya dituntut untuk bisa melebarkan sayapnya dan memperluas jaringan pengembangan basis masa dukungan yang akan menjadi daya politik partai.

Sebagai organisasi sayap dilingkungan Partai Golongan Karya, Angkatan Muda Partai Golongan Karya harus mengambil peran sebagai kekuatan yang mampu mengkonsolidasikan seluruh potensi pemuda

didalam lingkungan partai yang ditunjukan dengan kemampuan mengintegrasikan seluruh pemikiran, aktivitas, gerak, dan pelaksanaan program kepemudaan Partai Golongan Karya. Dalam kaitan itu, AMPG dituntut untuk bersifat terbuka dan tetap berorientaikan pada karya kekaryaan. Pada konteks yang lain, AMPG harus berperan sebagai pelanjut perjuangan Partai Golongan Karya di masa depan.

AMPG berperan melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasikan, dan mensinergikan aktivitas, gerak dan program kepemudaan Partai Golongan Karya. Dalam menjalankan program tersebut, AMPG melaksanakan sesuai dengan plat form, visi dan misi Partai Golongan Karya serta menjaga dan mengamalkan marwah kewibawaan Partai Golongan Karya. AMPG juga berperan dalam melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan kader, penggalangan dan pengembangan massa Partai Golongan Karya serta sebagai wadah keberhimpunan organisasi-organisasi potensial strategis kepemudaan seperti organisasi kemasyarakatan pemuda karya kekaryaan, mahasiswa dan kelompok swadaya masyarakat.

2. TUGAS AMPG

Dalam hubungan kelembagaan, AMPG yang merupakan organisasi sayap Partai Golongan Karya memposisikan diri sebagai bagian (embodied) dari Partai Golongan Karya. Ini berarti seluruh programprogram kepemudaan partai yang selama ini dilaksanakan oleh Bidang Pemuda Partai Golongan Karya sesuai tingkatannya, akan menjadi garapan operasional kegiatan Angkatan Muda Partai Golongan Karya disemua tingkatannya. Baik ditingkat pusat maupun

daerah. Selain program kepemudaan tersebut, AMPG juga bertugas menjadi pelaksana program-program yang terkait dengan fungsi elektoral partai, dimana program-program tersebut akan didistribusikan kepada OKP Kekaryaan yang tergabung dalam wadah AMPG untuk dilaksanakan. Mecermati itu, AMPG memiliki tugas pokok, yaitu :

1. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Partai Golongan Karya.
2. Melakukan kegiatan dalam rangka rekrutmen, pengkaderan, pengembangan dan penggalangan massa Partai Golongan Karya sesuai bidang dan kelompok strategisnya.
3. Merespon kebutuhan (Need) dan kepentingan (interest) pemuda, mahasiswa dan pelajar melalui bentuk-bentuk program pengembangan minat dan bakat.
4. Mempersiapkan kader-kader pemuda Partai Golongan Karya dalam rangka estafet kepemimpinan Partai Golongan Karya.

Dalam melaksanakan tugas pokok ini AMPG akan melakukan kegiatan-kegiatan dengan semangat perjuangan sebagai sayap Pemuda Partai Golongan Karya dengan berkoordinasi secara vertikal dan horizontal bagi kelancaran serta keselarasan pelaksanaan dan pencapaian tujuan program Partai Golongan Karya di bidang kepemudaan sebagai sebuah upaya dalam membela kemajuan dan panji-panji partai.

Untuk itulah AMPG harus melakukan orientasi program yang bertujuan untuk penajaman bentuk program secara kualitatif dan kuantitatif. Pada jangka menengah, Program AMPG diarahkan pada muatan program yang memiliki spektrum daya pengaruh yang secara langsung diarahkan pada upaya pemenangan Partai Golongan Karya pada setiap PEMILU. Dalam jangka panjang, Program AMPG diarahkan pada intinya agar Partai Golongan Karya memposisikan keberadaannya sebagai sejatinya sebuah partai politik. Oleh karena itu, sepanjang AMPG ada maka sepanjang itu Partai Golongan Karya berada, atau sepanjang Partai Golongan Karya berada,sepanjang itu pula AMPG memperlihatkan keberadaannya.

Oleh sebab itu, bentuk program tersebut harus memiliki muatan konsolidasi, kaderisasi, partisipasi dan komunikasi. Guna pencapaian tersebut, maka bentuk program Angkatan Muda Partai Golongan Karya harus berorientasi kepada :

1. Pemantapan konsolidasi visi, misi, dan strategi Angkatan Muda Partai Golongan Karya dalam garis pemikiran yang bersifat reformatif sebagai jawaban terhadap keinginan dan tuntutan Partai Golongan Karya guna meraih dan memantapkan kepercayaan rakyat terhadap Partai Golongan Karya.
2. Pemantapan hubungan dan membangun sinergitas dengan berbagai organisasi kepemudaan yang memiliki latar belakang

kesejarahan yang sama (OKP Kekaryaan) secara internal dalam merespon berbagai tuntutan reformasi dalam segala bidang. Pemantapan tersebut, haruslah bersumber pada asas konsolidasi, kaderisasi, kemasyarakatan, kelompok kepentingan, dan basis-basis konstituen kepemudaan. Pemantapan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Hubungan Angkatan Muda Partai Golongan Karya dengan organisasi kepemudaan kekaryaan atau organisasi yang memiliki keterikatan historis yang sama terhadap Partai Golongan Karya dibangun pola keberhimpunan dalam hubungan yang bersifat aliansi strategis dan struktural koordinatif aspiratif terhadap pelaksanaan program-program elektoral, penciptaan konstituen baru;
- b. Hubungan Angkatan Muda Partai Golongan Karya dengan LSM-LSM dan organisasi-organisasi kepemudaan lainnya yang tidak memiliki keterikatan historis dibangun dalam prospektif program yang bersifat fungsional koordinatif;
- c. Hubungan Angkatan Muda Partai Golongan Karya dengan LSM-LSM dan organisasi-organisasi profesi dibangun dalam kerangka mengembangkan program-program yang berorientasi pada basis massa.
- d. Pemantapan sebuah kelembagaan yang mengatur sistem kaderisasi yang permanen sebagai upaya memantapkan

organisasi Angkatan Muda Partai Golongan Karya sebagai Organisasi Kader.

- e. Pemantapan kepercayaan masyarakat melalui pendekatan kepedulian terhadap masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan pemuda pada khususnya.

Disamping AMPG harus melakukan orientasi program dalam bentuk penajaman program, dalam perspektif untuk memantapkan kinerja organisasi khususnya yang berkaitan dengan implementasi program, agar dapat berjalan sesuai dengan kebijakan organisasi. Oleh karena itu beberapa pendekatan pelaksanaan program ditempuh upaya-upaya berikut :

1. Pendekatan pelaksanaan program bersifat crass programme dalam artian ada penugasan partai kepada organisasi Angkatan Muda Partai Golongan Karya sebagai konsekuensi logis posisi dan pola hubungan yang bersifat instruktif.
2. Pendekatan pelaksanaan program yang bersifat otonom dalam artian program yang dilaksanakan oleh Angkatan Muda Partai Golongan Karya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Pendekatan pelaksanaan program yang bersifat kemitraan dalam artian Angkatan Muda Partai Golongan Karya dapat melakukan kerjasama program dengan berbagai organisasi kemasyarakatan baik partai politik maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya

B. Peran Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dalam Melaksanakan Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat.

1. Sebagai Fasilitator

Peran AMPG Kota Makassar Sebagai Fasilitator dalam pendidikan politik yang diamati peneliti adalah di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Pendidikan Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu responden di Kecamatan Manggala Kota Makassar mengenai pandangan tentang pendidikan politik dan latar belakang pelaksanaan pendidikan politik terhadap kaum muda, beliau mengatakan:

“Pendidikan politik sangat diperlukan agar para pemilih (Masyarakat) benar-benar mengetahui dan paham betul terhadap pentingnya keikutsertaan dalam suatu pemilihan umum di kota makassar , memang untuk menghadapi masa yang akan datang perlu untuk mempersiapkan pemimpin yang bisa dipertanggungjawabkan, punya dedikasi yang baik, bermoral, bertakwa untuk mempersiapkan pemimpin yang seperti itu perlu pendidikan politik. Jadi, pendidikan politik sangat perlu lebih-lebih kaum muda sebagai estafet perjuangan bangsa” (Hasil wawancara dengan SA.26 Juli 2018).

Dari hasil wawancara tersebut diatas penulis dapat memberi sedikit kesimpulan bahwa pendidikan politik sangat penting untuk diberikan kepada para pemilih, pada kaum muda ataupun tua sebagai estafet perjuangan bangsa sehingga dapat digunakan untuk mempersiapkan

pemimpin yang bertanggungjawab, mempunyai dedikasi yang baik, bermoral, iman dan takwa. Melalui pendidikan politik inilah kaum muda akan benar-benar mengetahui dan memahami betul asas maupun tujuan dari suatu pemilihan umum. Senada dengan hasil wawancara dengan salah satu Fungsiionaris AMPG Kecamatan Manggala Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

” Pendidikan politik dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai sebuah tahapan penting dalam pesta demokrasi untuk menentukan pilihan serta untuk menghindari menurunnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi yang di laksanakan setiap 5 tahun sekali (Hasil Wawancara Dengan BA, 26 Juli 2018). ”

Dari hasil wawancara tersebut diatas penulis dapat memberi sedikit kesimpulan bahwa pendidikan politik di masyarakat merupakan salah satu cara yang di tempuh oleh suatu organisasi atau lembaga swadaya masyarakat guna menarik ketertarikan masyarakat pada umumnya dalam memberikan hak politiknya baik di pilih maupun memilih. Senada dengan sebuah hasil wawancara terhadap salah satu masyarakat setempat daerah Kecamatan Manggala Kota Makassar menyatakan bahwa :

” Pendidikan politik yang biasa di lakukan oleh organisasi ataupun Lembaga swadaya masyarakat mempunyai manfaat yang cukup besar untuk memahamkan masyarakat umum bahwa politik tidak semata mata sebagai sebuah hal yang di anggap tidak bermartabat karna hanya memperebutkan kekuasaan semata tetapi sebagai suatu cara untuk menggunakan hak politik yang di miliki oleh setiap warga Negara dalam rangka menunjukan sikap politiknya” (Hasil wawancara dengan FM, 26 Juli 2018).

Hasil wawancara yang diberikan oleh informan tersebut memberikan keterangan kepada penulis bahwa Organisasi atau Lembaga Swadaya

masyarakat sebagai wadah yang ikut aktif dalam perannya mensukseskan suatu pesta demokrasi serta mempunyai peranan yang cukup penting dalam memberikan pandangan politik pada masyarakat awam dalam bentuk sosialisasi.

2. Sebagai Pembina

Lembaga Swadaya Masyarakat tidak hanya sebagai Fasilitator dalam proses pendidikan politik ke masyarakat luas tetapi juga sebagai Pembina. Dari keterangan yang diberikan oleh salah satu ketua LSM yang ada di Kecamatan Manggala Kota Makassar menyatakan bahwa:

“Yang saya tahe dek (adik) Salah satu peran penting LSM dalam pendidikan politik adalah “**penyuluhan**” di mana kegiatan yang dilakukan adalah Proses komunikasi yang dilakukan oleh fungsionaris/ anggota LSM atau Organisasi dalam rangka memberikan pengetahuan tentang program tentang kegiatan politik baik melalui kegiatan kunjungan rumah, pertemuan perorangan maupun pertemuan kelompok. Kegiatan tersebut dilakukan oleh para penggerak LSM atau Organisasi” (hasil wawancara dengan AS, 27 Juli 2018).

Hasil wawancara yang diberikan oleh informan tersebut memberikan keterangan kepada penulis bahwa dalam proses sosialisasi tentang pentingnya politik dalam kehidupan bermasyarakat, lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi lainnya juga melakukan penyuluhan “*Door to Door*” sebagai salah satu upaya untuk lebih mengakrabkan masyarakat dengan situasi politik yang sangat dinamis sehingga kemudian tidak memunculkan perspektif yang berbeda-beda. Dalam memberikan pendidikan politik peran LSM tentunya juga harus memiliki metode atau pendekatan

yang harus di lakukan hal ini yang kemudian di jelaskan oleh salah satu informan yang menyatakan bahwa;

“Metode yang digunakan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberikan pendidikan politik terhadap para pemilih dilaksanakan melalui beberapa metode” (Hasil wawancara dengan ZA,27 Juli 2018). Pernyataan di atas juga di perkuat dengan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti,pada tanggal 28 juli 2018 dengan mengikuti pertemuan yang Dilakukan Oleh lembaga Swadaya Masyarakat, bahwa metode yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik adalah berupa ceramah, presentasi maupun pemberian sanggahan yang diungkapkan oleh antara fungsionaris terhadap materi yang disampaikan yaitu mengenai pentingnya untuk ikut berpartisipasi sebagai suatu perwujudan warga Negara yang baik.

Dari hasil wawancara tersebut dengan responden memberikan pemikiran kepada penulis bahwa metode dalam sosialisasi dan penyuluhan secara langsung memang secara umum menggunakan dua teknik yakni ceramah dan persentasi. Fenonema rendahnya kesadaran politik masyarakat seringkali terjadi karena minimnya pemahaman dan informasi politik yang diperoleh masyarakat. Maka dengan adanya pendidikan politik yang masif kepada masyarakat diharapkan dapat menggugah kesadaran politik masyarakat untuk berperan aktif dalam proses politik bangsa dan negaranya melalui kegiatan pemilu/pemilukada. Pendidikan politik yang terprogram secara sistemik juga dapat menjadi sarana membentuk jiwa nasionalis masyarakat sedini mungkin sejak bangku pendidikan dasar.

C. Sosialisasi Pendidikan Politik Kepada Masyarakat

1. Sebagai Fasilitator

Angkatan Muda Partai Golkar juga memiliki kegiatan sosialisasi pendidikan politik terhadap masyarakat baik laki laki ataupun perempuan. kegiatan tersebut adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan AMPG kota Makassar menjelang Pemilu. Melalui kegiatan pendampingan dan sosialisasi ini diharapkan memperoleh seperangkat proses pendewasaan hidup bagi pemilih dalam bermasyarakat, pengambilan keputusan, dan keterlibatan para pemilih dalam mengikuti kebijakan publik melalui pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap dalam mencapai tujuan kesetaraan dan keadilan bersama dalam reasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian di atas juga di dukung oleh pendapat oleh Kartono, 2009: 78) yang menyatakan bahwa Lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah penyalur aspirasi atas hak dan kewajiban warga negara dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Lembaga swadaya masyarakat

2. Sebagai Pembina

Pendidikan politik tidak hanya mengenalkan calon-calon anggota legislative yang akan bertarung dalam Pemilu. Namun, pendidikan ini juga mengajak masyarakat untuk mengkritisi dan memberikan aspirasi untuk calon-calon legislative yang terpilih nantinya. Pernyataan ini dipertegas dengan hasil wawancara yang dilakukan

oleh peneliti pada seorang anggota (AMPG) yang ada di kota Makassar sebagai sebuah langkah pembinaan atau dengan kata lain cara yang di anggap elegan dalam menyampaikan sebuah pendapat. Dari hasil penelitian pada paragraph sebelumnya juga dapat di jelaskan bahwa AMPG tentunya juga harus menjadi bahagian penting dari aspek berdemokrasi sebagai mana yang di jelaskan oleh Kartono (2009: 78) yang menjelaskan bahwa Lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah yang ikut aktif dalam perannya mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Serta dalam hal ini ikut menjaga kedaulatan negara serta menjaga ketertiban sosial.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari suatu penelitian adalah kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkuman dari seluruh hasil pembahasan penelitian. Pada akhir bagian tulisan ini penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut yaitu :

1. Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Dalam Pendidikan Politik Masyarakat di kota Makassar berdasarkan hasil penelitian sudah cukup berperan melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat di kota Makassar. Kesimpulan ini di dukung pada data hasil wawancara yang mana LSM berperan pada dua Hal yakni:
 - a. Sebagai Fasilitator dimana dapat di simpulkan bahwa Organisasi atau Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) sebagai wadah yang ikut aktif dalam perannya mensukseskan suatu pesta demokrasi serta mempunyai peranan yang cukup penting dalam memberikan pandangan politik pada masyarakat awam serta Pendidikan politik menanamkan nilai dan norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta menjadi dasar nilai untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Sebagai Pembina, jelaskan bahwa pentingnya politik dalam kehidupan bermasyarakat, lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi Lainnya juga melakukan penyuluhan “*Door to Door*” sebagai salah satu upaya untuk lebih mengakrabkan masyarakat dengan situasi politik yang sangat dinamis sehingga kemudian tidak memunculkan perspektif yang berbeda beda. Dalam memberikan pendidikan politik juga disimpulkan bahwa Lembaga swadaya Masyarakat juga menjelaskan tentang cara cara yang elegan dalam menyampaikan sebuah aspirasi atau memberikan kritikan yang sifatnya membangun.

2. Sosialisasi Politik ke Masyarakat umumnya menggunakan Penyuluhan Langsung ke Masyarakat dengan menggunakan metode: Ceramah, Persentasi dan Tanya Jawab.

B. Saran-saran

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan beberapa saran yang mungkin mampu dijadikan pertimbangan bagi beberapa pihak terkait untuk melakukan peningkatan pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Bantul.

1. Lembaga Swadaya Masyarakat

a. Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) diharapkan mampu lebih masif dan terstruktur dalam melakukan pendidikan politik ke masyarakat kota Makassar khususnya di kecamatan Manggala tidak hanya ketika mendekati pemilu saja Akan tetapi kegiatan pendidikan politik harus lebih rutin dilakukan.

- b. Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) diharapkan mampu memberikan inovasi dan terobosan baru dalam membuat suatu kegiatan ataupun sosialisasi yang berkaitan dengan pendidikan politik.
- c. Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) diharapkan mulai peka terhadap kemauan rakyat sehingga apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat dapat di tampung dan diberikan solusi.

2. Pemerintah Daerah

- a. Pemerintah Daerah diharapkan turut serta membantu partai politik dan elemen lainnya dalam aspek edukasi maupun pendanaan dalam upaya melakukan pendidikan politik di masyarakat kecamatan Manggala kota makassar untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
- b. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pendidikan politik yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat supaya tidak ada kesalahan ataupun kepentingan dan unsur lainnya selain pendidikan politik yang bersih.

3. Masyarakat

Masyarakat juga sebaiknya mulai sadar akan pendidikan politik yang penting dipahami karena setiap warga negara memiliki hak politik yang

dapat di maksimalkan sebaik mungkin serta masyarakat diharapkan untuk kritis terhadap setiap kegiatan politik di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Mochtar 1986. *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, Bandung: Lembaga Penerbitan Fakultas Sosial Politik Universitas Padjadjaran Bandung.
- Amirudin. Zaini, A. B. 2006. *Pilkada langsung, problem dan prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bastian Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Buiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama.
- Gaffer, A. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irwan. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Masyarakat dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta. Depublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama)
- Kartini, K. (2009). *Pendidikan Politik*: Mandar Maju. Bandung
- Purnomo, Setiawan, Hari dan Zulkieflimansyah. 2012. *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rusadi Kantaprawira. 2006. *Sistem politik Indonesia : suatu model pengantar*. Bandung. Sinar Baru Algensindo
- Supriatna, Jatna. 2008. *Melestarikan alam Indonesia*. DKI Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju masyarakat partisipatif*. Yogyakarta. PT Tiara Wacana.

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_swadaya_masyarakat Di akses pada tanggal 05 April

<http://docplayer.info/64286712-Partisipasi-lembaga-swadaya-masyarakat-lsm-pendidikan-dalam-perumusan-kebijakan-di-dinas-pendidikan-pemuda-dan-olahraga-dikpora-diy-skripsi.html> di akses pada tanggal 13 April 2018

Hagul,P (1992). *Pembangunan Desa dan lembaga Swadaya Masyarakat*. Rajawali Press. Jakarta

Kartono, Kartini. 2009. *Pendidikan Politik : Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju

RIWAYAT HIDUP



SURYADI, Di lahirkan di Kabupaten Manggarai Barat tepatnya di pulau Seraya Kecil, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo pada tanggal 09 Desember 1991. Anak ke dua dari lima bersaudara pasangan dari Abd Gan dan Salina. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN No 4 Pulau Madu di Kecamatan Selayar pada tahun 1999. Di tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di SMP N 2 Benteng Selayar, Kecamatan Selayar dan selesai pada tahun 2007, kemudian kembali melanjutkan pendidikan di sekolah Muhammadiyah Benteng pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun 2011 peneliti kembali melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Pemerintahan dan selesai pada tahun 2018